



PROFIL KESEJAHTERAAN SOSIAL

2018



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



DINAS SOSIAL



PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1. ANAK BALITA TERLANTAR
2. ANAK TERLANTAR
3. ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
4. ANAK JALANAN
5. ANAK DENGAN KEDISABILITASAN
6. ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH
7. ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
8. LANJUT USIA TERLANTAR
9. PENYANDANG DISABILITAS
10. TUNA SUSILA
11. GELANDANGAN
12. PENGEMIS
13. PEMULUNG
14. KELOMPOK MINORITAS
15. BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN
16. ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)
17. KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
18. KORBAN TRAFFICKING
19. KORBAN TINDAK KEKERASAN
20. PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL
21. KORBAN BENCANA ALAM
22. KORBAN BENCANA SOSIAL
23. PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI
24. FAKIR MISKIN
25. KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS
26. KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

1. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL
2. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
3. TARUNA SIAGA BENCANA
4. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. KARANG TARUNA
6. LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
7. KELUARGA PIONIR
8. WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL
9. WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
10. PENYULUH SOSIAL
11. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
12. DUNIA USAHA YANG MELAKUKAN UKS

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puja syukur kami panjatkan kehadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNYA penyusunan Buku Profil Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Profil Kesejahteraan Sosial ini memuat gambaran umum, kondisi geografis daerah Kabupaten Buleleng, perkembangan penduduk, ketenagakerjaan dan kondisi makro sosial ekonomi yang secara keseluruhan akan mempengaruhi terhadap hasil penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dalam menunjang penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan untuk semua keperluan baik sebagai informasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan khususnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Buleleng.

Kami atas nama Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018 menyampaikan ucapan terima kasih karena selesainya penyusunan buku profil ini merupakan hasil kerja Tim dan masukan dari banyak pihak terkait diantaranya Bappeda Litbang, Badan Pusat Statistik, Dinas



Statistik, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat dan Bidang Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Walaupun demikian kami sangat menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan agar kedepannya kami dapat menyusun profil dengan lebih baik.

Sekian dan Terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Singaraja, Oktober 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650704 198602 1 009



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	4
2.1 LETAK GEOGRAFIS	4
2.1.1 Letak Wilayah.....	4
2.1.2 Luas Wilayah.....	5
2.1.3 Topografi.....	6
2.1.4 Iklim.....	8
2.1.5 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Desa Adat.....	9
2.2 KEPENDUDUKAN	9
2.2.1 Jumlah Dan Persebaran Penduduk.....	9
2.2.2 Kepadatan Penduduk.....	11
2.2.3 Pertumbuhan Penduduk.....	12
2.3 INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI	14
2.3.1 Kemiskinan Makro Di Kabupaten Buleleng.....	14
2.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Buleleng	21
2.3.3 Distribusi Pendapatan Penduduk 40% Terbawah.....	24
2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia	27
2.3.5 Komponen Peluang Hidup.....	30
2.3.6 Komponen Pengetahuan.....	31



2.3.7	Komponen Hidup Layak	34
2.4	KETENAGAKERJAAN	35
2.4.1	Kondisi Umum Ketenagakerjaan Di Kabupaten Buleleng Dari Tahun 2013 – 2017.....	35
2.4.2	Jumlah Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2017.....	36
2.4.3	Data Jumlah Perusahaan (Dunia Usaha) Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2016	38
BAB III	SUMBER DAYA.....	39
3.1	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN	39
3.1.1	Visi	39
3.1.2	Misi	42
3.1.3	Tujuan Dan Sasaran	43
3.1.4	Kebijakan	45
3.2	STRUKTUR ORGANISASI	46
3.2.1	Kondisi Umum Kepegawaian	48
3.2.2	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	53
3.2.3	Kondisi Sarana Dan Prasarana	54
3.3	TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL	56
BAB IV	DATA UMUM KESEJAHTERAAN SOSIAL	74
4.1	URUSAN SOSIAL	74
4.2	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	74
4.3	JENIS-JENIS PELAYANAN DASAR DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	76
4.3.1	Anak Terlantar	76
4.3.2	Lanjut Usia Terlantar	77
4.3.3	Penyandang Disabilitas	77
4.3.4	Tuna Susila	78



4.3.5 Gelandangan	79
4.3.6 Pengemis	80
4.3.7 Korban Bencana Alam	81
4.3.8 Fakir Miskin	82
4.4 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	83
4.4.1 Pekerja Sosial Profesional	83
4.4.2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	84
4.4.3 Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	84
4.4.4 Lembaga Kesejahteraan Sosial Selanjutnya Disebut LKS ...	85
4.4.5 Karang Taruna	85
4.4.6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	85
4.4.7 Keluarga Pioner	86
4.4.8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	86
4.4.9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	87
4.4.10 Penyuluh Sosial	87
4.4.11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Yang Selanjutnya Disebut TKSK	88
4.4.12 Dunia Usaha	89
 BAB V PROFIL KESEJAHTERAAN SOSIAL	 90
5.1 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	90
5.1.1 Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017	90
5.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan Pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	91
5.2 BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	95
5.2.1 Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2017	95
5.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan dan	



Rehabilitasi Sosial Tahun 2017	96
5.3 BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	105
5.3.1 Program dan Kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2017	105
5.3.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2017	106
5.4 UPTD MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN	115
5.4.1 Program dan Kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan.....	115
5.4.2 Realisasi Program dan Kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan	115
BAB VI PENUTUP	130



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Peta Wilayah Kabupaten Buleleng.....	4
2.2 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Menurut Kecamatan.....	6
2.3 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut	7
2.4 Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2017	8
2.5 Laju Perkembangan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2017	10
2.6 Laju Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017	12
2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Periode Th. 2013-2017.	14
2.8 Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2013-2017	16
2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Buleleng Th. 2013-2017	17
2.10 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota se-Provinsi Bali Th. 2017.	18
2.11 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Prov. Bali Th. 2017 (Ribuan)	18
2.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2017.....	19
2.13 Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2017	20
2.14 Kontribusi PDRB Kab. Buleleng Terhadap PDRB Prov. Bali Th 2017 (%) ...	21
2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2011-2017 (%).....	22
2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (%)	23
2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab./Kota di Provinsi Bali Tahun 2017 (%)	23
2.18 Gini Rasio Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2017	26
2.19 Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2017	27
2.20 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017 ..	28
2.21 Angka Harapan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017.....	30



2.22	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017	31
2.23	Angka Harapan Lama Sekolah di Kab. Buleleng dan Bali Th. 2013-2017	32
2.24	Rata-rata Lama Sekolah di Kab. Buleleng dan Prov. Bali Th. 2013-2017	33
2.25	Paritas Daya Beli Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2013-2017	34
2.26	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng	36
2.27	Data Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng	37
2.28	Laju Perkembangan Dunia Usaha (Perusahaan) di Kabupaten Buleleng	38
3.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018	47



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Luas Kab. Buleleng Menurut Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan	5
2.2 Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian di Atas Permukaan Laut	7
2.3 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Desa Adat di Kabupaten Buleleng Tahun 2017	9
2.4 Jumlah Perkembangan Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2017	10
2.5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017	11
2.6 Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Umur Tahun 2013-2017	13
2.7 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2017	29
2.8 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng	35
2.9 Data Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng	37
2.10 Data Jumlah Dunia Usaha di Kabupaten Buleleng	38
3.1 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	49
3.2 Daftar Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	50
3.3 Data Pegawai PNS Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenis Kelamin.....	50
3.4 Data Pegawai Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan	51
3.5 Data Pegawai Kontrak Pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin	51
3.6 Data Pegawai Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan.....	52
3.7 Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Golongan.....	52
3.8 Data Pegawai UPT Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenis Kelamin.....	53



3.9	Data Pegawai UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan.....	54
3.10	Data Pegawai UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Golongan.....	54
3.11	Sarana dan Prasarana.....	55
4.1	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Buleleng Tahun 2017.....	75
4.2	Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	76
4.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017.....	77
4.4	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017..	78
4.5	Jumlah Tuna Susila di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017.....	79
4.6	Jumlah Gelandangan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	79
4.7	Jumlah Pengemis di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017.....	80
4.8	Jumlah Korban Bencana Alam di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017 ...	81
4.9	Jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017.....	82
4.10	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Buleleng Tahun 2017	83
5.1	Jumlah Keluarga Fakir Miskin Yang Memperoleh Bantuan Sosial Di Kab. Buleleng Tahun 2013-2017.....	91
5.2	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Buleleng Tahun 2017	94
5.3	Jumlah Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Buleleng Th. 2013-2017	94
5.4	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Buleleng Tahun 2013-2017.....	95
5.5	Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	96



5.6	Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	97
5.7	Jumlah Penerima Bantuan Untuk Lanjut Usia Terlantar di Kab. Buleleng Tahun 2013-2017	97
5.8	Data Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017 (APBN)	98
5.9	Data Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017 (APBD)	98
5.10	Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kedisabilitasannya di Kab. Buleleng Tahun 2013-2017	99
5.11	Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Dengan Kedisabilitasannya (ADK) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	101
5.12	Jumlah Penerima Bantuan dan Pelayanan Untuk Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	101
5.13	Data Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Alat Bantu Tahun 2013-2017	102
5.14	Data Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017	104
5.15	Jumlah Gelandangan Yang Dipulangkan Ke Daerah Asal Th. 2013-2017 ...	104
5.16	Jumlah Pengemis Yang Di Razia Tim Yustisi dan Dipulangkan Ke Daerah Asal Tahun 2013-2017	105
5.17	Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	106
5.18	Data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Buleleng Tahun 2016	106
5.19	Data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Buleleng Tahun 2017	109
5.20	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kab.	



Buleleng Tahun 2013-2017.....	112
5.21 Jumlah Korban Bencana Sosial Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kab. Buleleng Tahun 2013-2017.....	112
5.22 Data Penerima Bantuan Santunan Kematian Masyarakat Miskin (SANTIMAS) Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017	113
5.23 Data Keluarga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Buleleng Tahun 2013-2017.....	113
5.24 Data Keluarga Fakir Miskin Kabupaten Buleleng Yang Telah Memperoleh Bantuan KKS dan KIS Tahun 2013-2017.....	114
5.25 Data Taman Makam Pahlawan (TMP), Monumen dan Tugu Perjuangan Yang Diserahkan dan Dikelola Oleh Pemerintah Kab. Buleleng Th. 2017 ...	116
5.26 Data Monumen dan Tugu Perjuangan Yang Belum Diserahkan dan Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017	117



1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat yang mencakup semua aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.

Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional dalam Pembangunan bidang kesejahteraan sosial menjamin terselenggaranya pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang berkualitas dengan tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial hal ini akan dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan penanganan masalah baik yang bersifat prioritas/utama maupun penunjang.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani pesatnya perkembangan masalah kesejahteraan sosial mendorong paradigma dengan mengedepankan peran pemerintah daerah serta masyarakat luas sebagai potensi yang perlu diperhitungkan. Untuk itulah Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk mengarahkan dan memformulasikan pelaksanaan masalah kesejahteraan sosial sebagai konsekuensi tugas, pokok dan fungsi dibidang kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Buleleng masalah kesejahteraan sosial masih diwarnai dengan banyaknya permasalahan sosial yang cukup tinggi diantaranya adalah masalah kemiskinan.



Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh banyaknya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanganannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan urusan wajib atau yang berkaitan pelayanan dasar untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Sehubungan hal tersebut guna mengetahui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng baik dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial maka perlu disajikan data dan informasi dalam bentuk **“Profil Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buleleng”**.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Profil Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buleleng dengan berpedoman pada :

1. Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng; dan
12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 460/414/HK/2017 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Penyusunan Profil Kesejahteraan Sosial ini adalah tersedianya dokumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dan kebijakan Dinas Sosial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Mengetahui perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.
- b. Tersedianya Informasi tentang program dan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta perkembangannya di Kabupaten Buleleng secara akurat dan terupdate.
- c. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang nantinya dapat bermanfaat untuk bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan target sasaran dan program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



2.1. LETAK GEOGRAFIS

2.1.1. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari barat ke timur, terletak pada posisi koordinat diantara 8°03'40" - 8°23'00" Lintang Selatan (LS) dan 114° 25'55" – 115°27'28" Bujur Timur (BT).

Secara Administrasi Kabupaten Buleleng memiliki Batas Wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa/Bali
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Jembrana
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Karangasem

Dan terbagi dalam 9 (Sembilan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Dinas Statistik Kabupaten Buleleng

2.1.2. Luas Wilayah

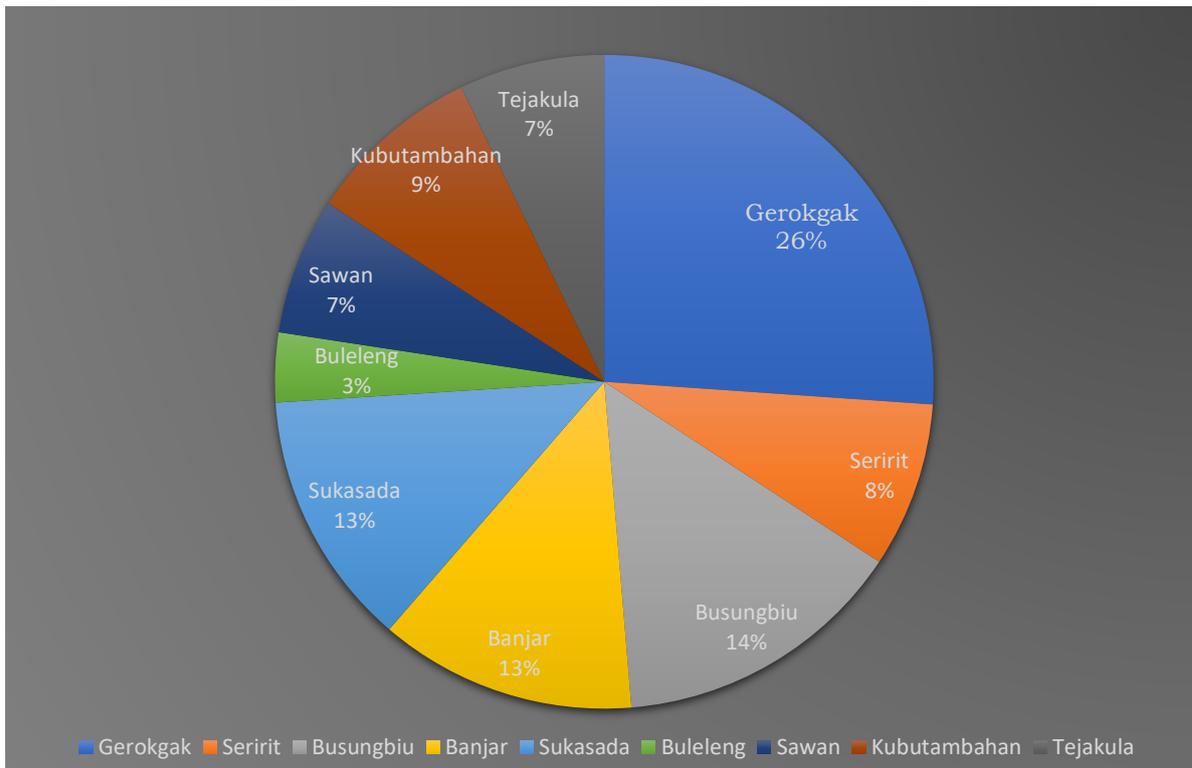
Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali memiliki wilayah seluas 1.365,88 Km² dengan pantai sepanjang 157,05 Km dimana Kecamatan Gerokgak memiliki pantai terpanjang diantara 9 kecamatan (Sukasada dan Busungbiu tidak memiliki pantai) di Kabupaten Buleleng yaitu sepanjang 76,89Km dan memiliki wilayah paling luas yaitu 26,11% dari luas Kabupaten Buleleng. Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan paling kecil luas wilayahnya yaitu seluas 3,44% dari luas Kabupaten Buleleng. Secara keseluruhan luas Kabupaten Buleleng sebesar 24,23% dari luas Propinsi Bali. Luas wilayah Kabupaten Buleleng untuk setiap kecamatan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Kabupaten Buleleng Menurut Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Panjang Pantai (Km)	% Terhadap Luas Kabupaten	% Terhadap Luas Provinsi (5.632,86 Km ²)
1	2	3	4	5	6
1	Gerokgak	356,57	76,89	26,11	6,33
2	Seririt	111,78	11,61	8,18	1,98
3	Busungbiu	196,62	-	14,40	3,49
4	Banjar	172,60	8,06	12,64	3,06
5	Sukasada	172,93	-	12,66	3,07
6	Buleleng	46,94	16,52	3,44	0,83
7	Sawan	92,52	6,92	6,77	1,64
8	Kubutambahan	118,24	9,82	8,66	2,10
9	Tejakula	97,68	27,23	7,15	1,73
JUMLAH		1.365,88	157,05	100	24,23

Sumber Data : Dinas Statistik Kabupaten Buleleng

Gambar 2.2
 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Menurut Kecamatan



Sumber Data : Dinas Statistik Kabupaten Buleleng

2.1.3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan, sedangkan di bagian utara yakni merupakan dataran rendah. Diantaranya perbukitan terdapat gunung berapi dan tidak berapi, gunung tertinggi adalah Gunung Tapak (1.903 m) berada di Kecamatan Sukasada dan yang terendah Gunung Joe (22 m) di Kecamatan Gerokgak.

Begitu juga Kabupaten Buleleng memiliki banyak sungai besar dan kecil, sebagian merupakan sungai tadah hujan. Selain itu ada 2 (dua) buah Danau Buyan (360 Ha) yang terletak di Kecamatan Sukasada dan Danau Tamblingan (110 Ha) yang terletak di Kecamatan Banjar. Luas wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan ketinggian dari permukaan laut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

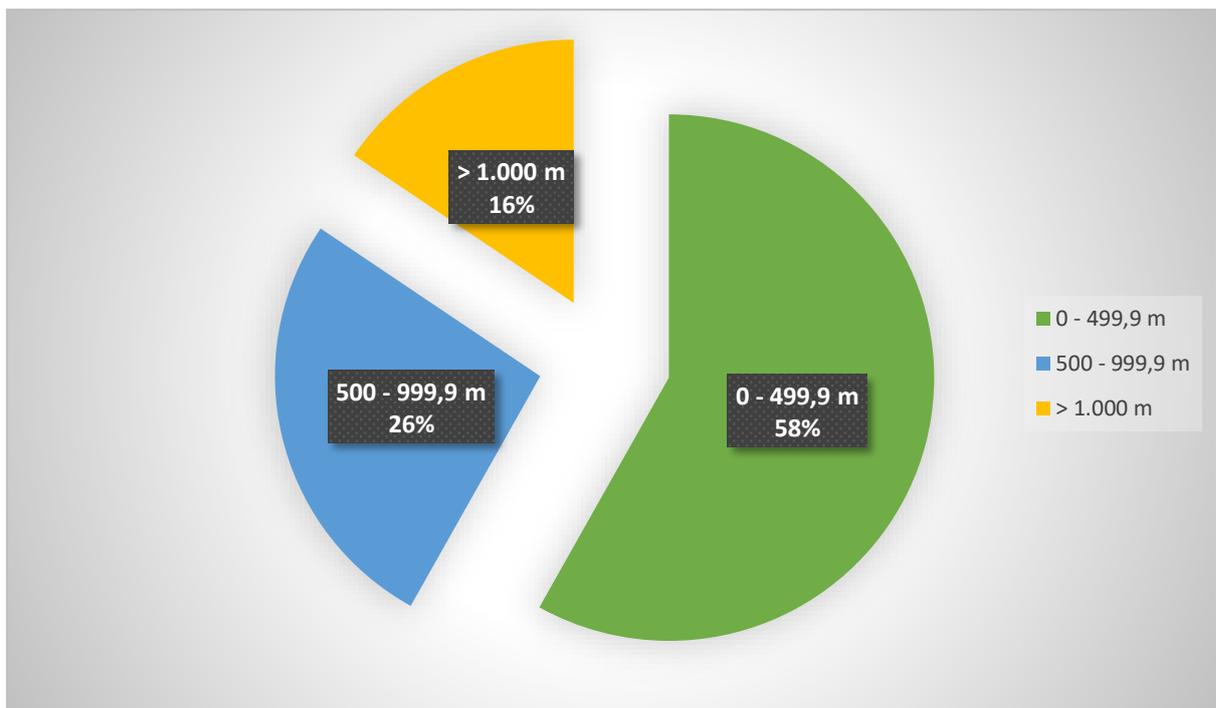
Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian di Atas Permukaan Laut

No	Kecamatan	Luas Wilayah dan Ketinggian di Atas Permukaan Laut (Ha)			Jumlah
		0 – 499,9 m	500 – 999,9 m	> 1.000 m	
1	2	3	4	5	6
1	Gerokgak	29.879	5.543	235	35.567
2	Seririt	9.528	1.650	0	11.178
3	Busungbiu	6.563	12.231	868	19.662
4	Banjar	7.481	4.228	5.551	17.260
5	Sukasada	6.296	3.425	7.572	17.293
6	Buleleng	4.694	-	-	4.694
7	Sawan	2.541	2.612	4.099	9.252
8	Kubutambahan	5.820	3.125	2.879	11.824
9	Tejakula	6.584	3.184	-	9.768
J u m l a h		79.386	35.998	21.204	136.558

Sumber Data : Dinas Statistik Kabupaten Buleleng

Gambar 2.3

Persentase Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut



Sumber Data : Dinas Statistik Kabupaten Buleleng

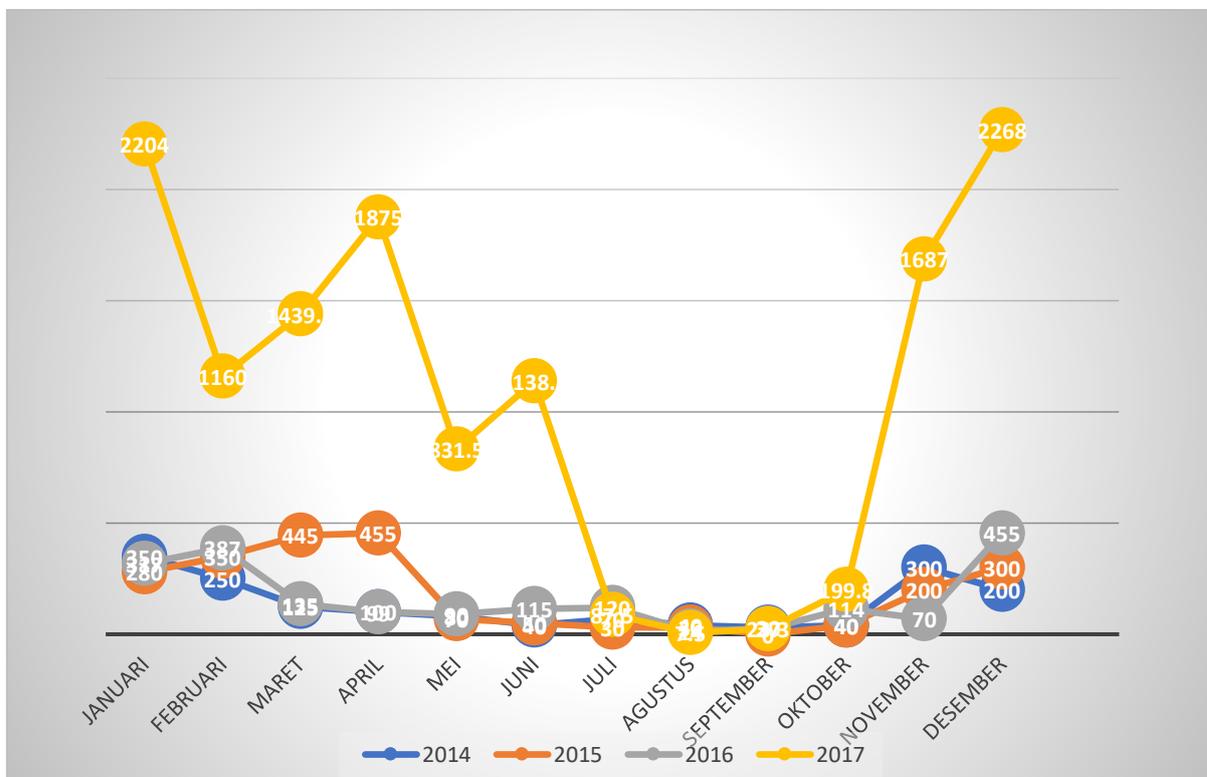
2.1.4. Iklim

Kabupaten Buleleng seperti juga daerah lainnya di Indonesia beriklim tropis dengan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan pada tahun 2014 bervariasi setiap bulan dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan curah hujan terendah pada bulan September.

Curah hujan pada tahun 2015 bervariasi pada setiap bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April dan curah hujan terendah pada bulan Juli dan Agustus, sedangkan pada bulan September tidak turun hujan. Pada tahun 2016 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan curah hujan terendah pada bulan Agustus, sedangkan curah hujan pada tahun 2017 bervariasi setiap bulan dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 2.204 mm dan curah hujan terendah pada bulan September sebesar 23,3 mm. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Buleleng dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tersaji pada grafik berikut ini :

Gambar 2.4

Rata-Rata Curah Hujan Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2017



Sumber Data : Dinas Statistik Kabupaten Buleleng

2.1.5. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Desa Adat

Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 Kecamatan, 148 Desa/Kelurahan dan 167 Desa Adat/Pakraman, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Desa Adat Di Kab. Buleleng Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun/Banjar	Lingkungan	Desa Adat (Pakraman)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gerokgak	14	0	75	0	14
2	Seririt	20	1	80	5	25
3	Busungbiu	15	0	41	0	16
4	Banjar	17	0	71	0	17
5	Sukasada	14	1	63	5	20
6	Buleleng	12	17	41	53	21
7	Sawan	14	0	69	0	17
8	Kubutambahan	13	0	46	0	22
9	Tejakula	10	0	60	0	15
Jumlah		129	19	546	63	167

Sumber Data : Dinas Statistik Kabupaten Buleleng

2.2. KEPENDUDUKAN

2.2.1. Jumlah Dan Persebaran Penduduk

Informasi tentang jumlah penduduk sangat penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk disuatu wilayah dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (penambah penduduk), disisi lain dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Disamping itu jumlah penduduk dipengaruhi oleh Migrasi penduduk, Imigrasi (pendatang) akan menambah jumlah penduduk, Emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk.

Pada tahun 2017 Kabupaten Buleleng mempunyai jumlah penduduk sebanyak 816.654 jiwa yang terdiri dari 408.788 penduduk laki-laki dan 407.866 penduduk perempuan. Penduduk tersebut menyebar di 9 (sembilan) Kecamatan.



Jumlah dan distribusi penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan Kecamatan dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.4

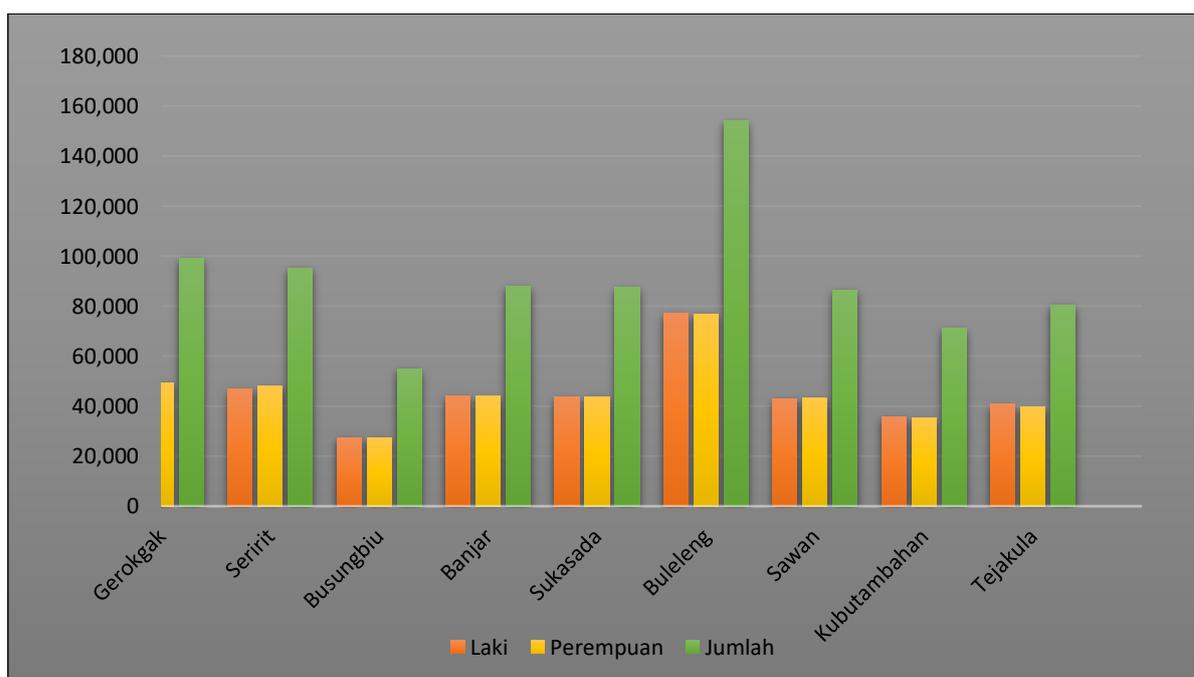
Jumlah Perkembangan Penduduk Per-Kecamatan di Kab. Buleleng Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Gerokgak	49.673	49.351	99.024
2	Seririt	47.065	47.945	95.010
3	Busungbiu	27.422	27.554	54.976
4	Banjar	44.117	44.042	88.159
5	Sukasada	43.656	43.840	87.496
6	Buleleng	77.281	76.936	154.217
7	Sawan	43.113	43.258	86.371
8	Kubutambahan	35.722	35.363	71.085
9	Tejakula	40.739	39.577	80.316
JUMLAH		408.788	407.866	816.654

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Gambar 2.5

Laju Perkembangan Penduduk Per-Kecamatan di Kab. Buleleng Periode Tahun 2017



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng



Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa wilayah Kecamatan Buleleng mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 154.217 jiwa atau 18.88% dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Buleleng adalah wilayah pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Sehingga pembangunan perkantoran, perumahan, perdagangan, transportasi dan demikian juga penduduk Kabupaten Buleleng terutama penduduk pendatangnya lebih memilih berdomisili di wilayah Kecamatan Buleleng. Sebaliknya Kecamatan Busungbiu memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 54.976 jiwa atau 6,73% dari jumlah penduduk keseluruhan hal ini disebabkan Karena wilayah Kecamatan Busungbiu merupakan daerah perbukitan.

2.2.2. Kepadatan Penduduk

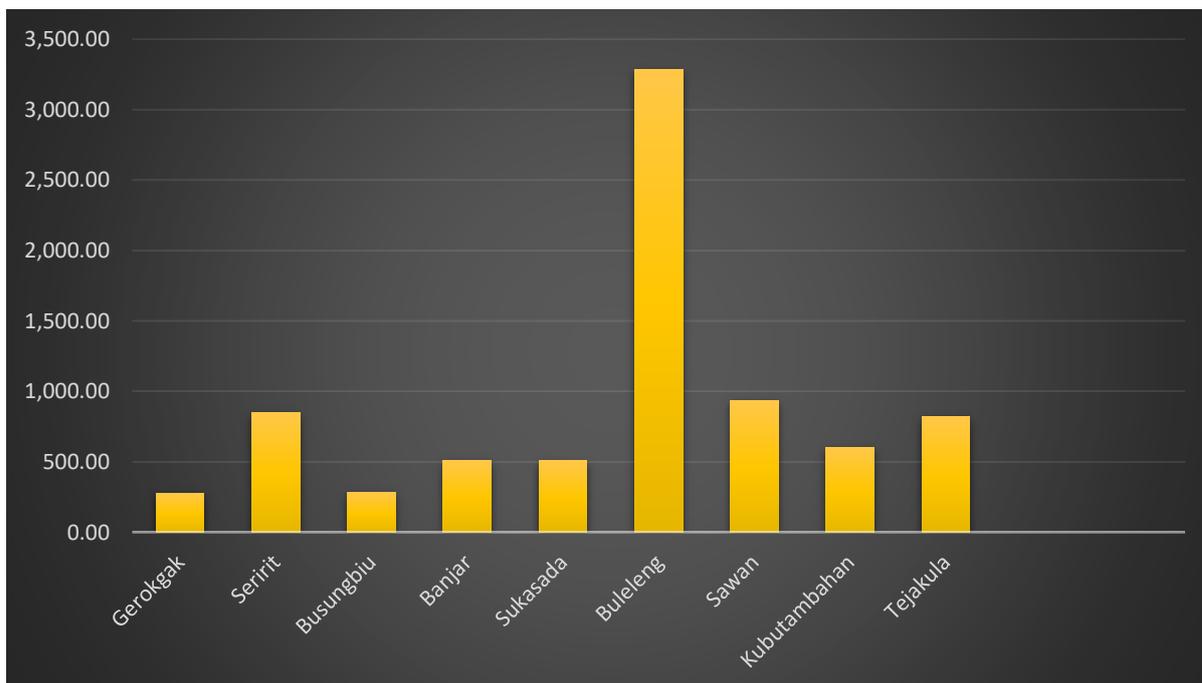
Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun diakibatkan oleh perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah baik karena perubahan alami maupun karena perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, indikator jumlah kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang. Rasio kepadatan penduduk dihitung dengan rumus, Jumlah Penduduk : Luas Wilayah. Untuk dapat melihat kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah Km2	Kepadatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Gerokgak	49.673	49.351	99.024	356.57	277.71
2	Seririt	47.065	47.945	95.010	111.78	849.97
3	Busungbiu	27.422	27.554	54.976	196.62	279.61
4	Banjar	44.117	44.042	88.159	172.62	510.71
5	Sukasada	43.656	43.840	87.496	172.93	505.96
6	Buleleng	77.281	76.936	154.217	46.94	3.285.40
7	Sawan	43.113	43.258	86.371	92.52	933.54
8	Kubutambahan	35.722	35.363	71.085	118.24	601.19
9	Tejakula	40.739	39.577	80.316	97.68	822.24
JUMLAH		408.788	407.866	816.654	1,365.90	597.887

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Gambar 2.6
Laju Kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas diperoleh informasi bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 mencapai 597.887 jiwa/Km². Ini berarti bahwa dalam setiap kilometer persegi wilayah di Kabupaten Buleleng dihuni dengan Penduduk kurang lebih sebanyak 598 jiwa, dari tabel dan grafik diatas jika dilihat Kecamatan Buleleng paling tinggi tingkat kepadatannya dan yang paling rendah adalah Kecamatan Busungbiu.

2.2.3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran prosentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu di dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah merupakan migrasi penduduk, Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan proyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Berikut tabel dan grafik penduduk Kabupaten Buleleng menurut umur dari tahun 2013 - 2017.

Tabel 2.6
Penduduk Kabupaten Buleleng menurut Umur Tahun 2013 - 2017

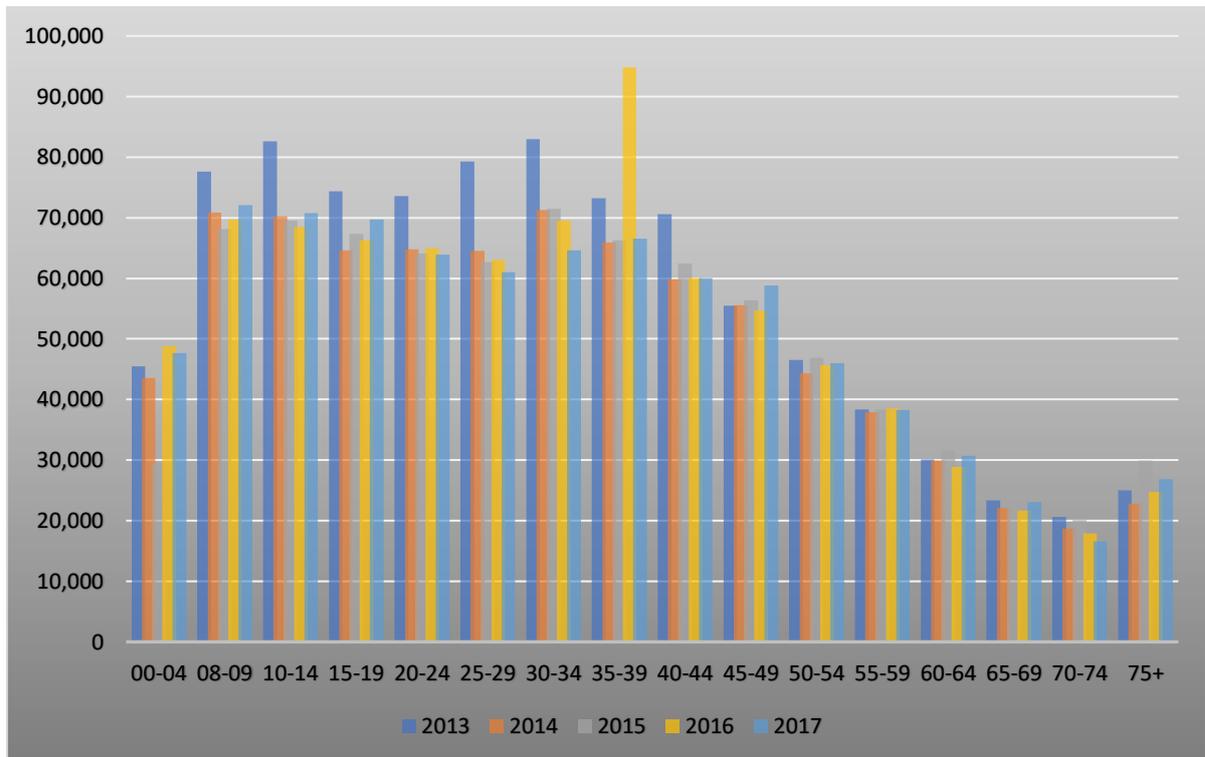
No	Kelompok Umur	Tahun					Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-4	45.474	43.512	29.450	48.842	47.696	0,977
2	5-9	77.626	70.816	68.096	69.741	72.115	1,034
3	10-14	82.581	70.201	69.519	68.487	70.802	1,034
4	15-19	74.363	64.571	67.315	66.306	69.679	1,050
5	20-24	73.587	64.812	64.060	64.928	63.944	0,984
6	25-29	79.263	64.558	62.684	62.989	60.986	0,968
7	30-34	82.921	71.278	71.420	69.564	64.582	0,928
8	35-39	73.177	65.966	66.255	94.848	66.567	0,702
9	40-44	70.566	59.833	62.447	60.047	60.042	0,910
10	45-49	55.452	55.577	56.325	54.679	58.825	1,076
11	50-54	46.563	44.332	46.849	45.642	45.958	1,007
12	55-59	38.397	37.896	38.320	38.565	38.238	0,992
13	60-64	30.087	29.896	31.632	28.905	30.696	1,062
14	65-69	23.352	22.155	23.071	21.671	23.108	1,066
15	70-74	20.585	18.732	20.117	17.927	16.601	0,926
16	75+	24.973	22.812	29.963	24.743	26.815	1,084

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng



Gambar 2.7

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2013 - 2017



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas diperoleh informasi bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2013 sampai tahun 2017 yang paling tinggi pertumbuhannya adalah umur 35-39 tahun, ini adalah usia produktif dan yang paling rendah adalah umur 70-74 tahun, adalah usia sudah tidak produktif.

2.3. INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI

2.3.1 Kemiskinan Makro Di Kabupaten Buleleng

Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kemiskinan yang meningkat dapat memberikan sinyal bahwa pembangunan perekonomian perlu mendapat perhatian dan perbaikan.

Pengukuran kemiskinan secara makro, oleh BPS dan beberapa negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, Gambia, dikonsepsikan sebagai kemampuan seseorang/penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan

dipandang sebagai ketidak-mampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dalam menentukan penduduk yang miskin dan penduduk yang tidak miskin, BPS menggunakan Garis Kemiskinan sebagai *cut point*, dimana penduduk yang konsumsi rata-rata per kapitanya kurang dari Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan ini diperoleh dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

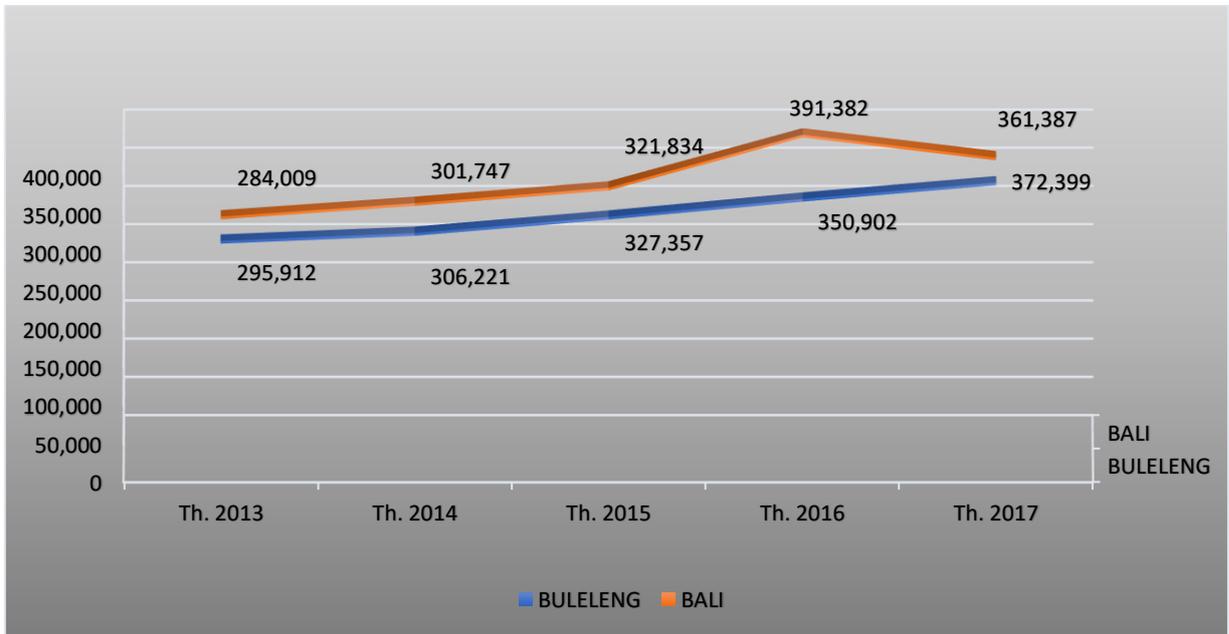
Masing-masing kabupaten/kota di Indonesia memiliki Garis Kemiskinan yang berbeda. Demikian juga pada tingkat provinsi, masing-masing provinsi di Indonesia memiliki Garis Kemiskinan yang berbeda. Jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Bali.

Selama lima tahun terakhir, Garis kemiskinan yang distandarkan dengan satuan rupiah selalu mengalami peningkatan. Hal ini terjadi baik di Kabupaten Buleleng maupun di seluruh Bali. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Buleleng selalu berada dibawah rata-rata Provinsi Bali, dan bahkan ada kecenderungan semakin menjauh dari rata-rata Bali. Keadaan ini merefleksikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Buleleng per bulannya makin menjauh dari rata-rata pengeluaran penduduk Bali. Pada tahun 2017, penduduk miskin di Kabupaten Buleleng ditentukan dengan nilai pengeluaran



per bulan sebesar 372.399 rupiah. Penduduk dengan pengeluaran dibawah standar tadi, akan tergolong sebagai penduduk miskin.

Gambar 2.8
Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2013 - 2017

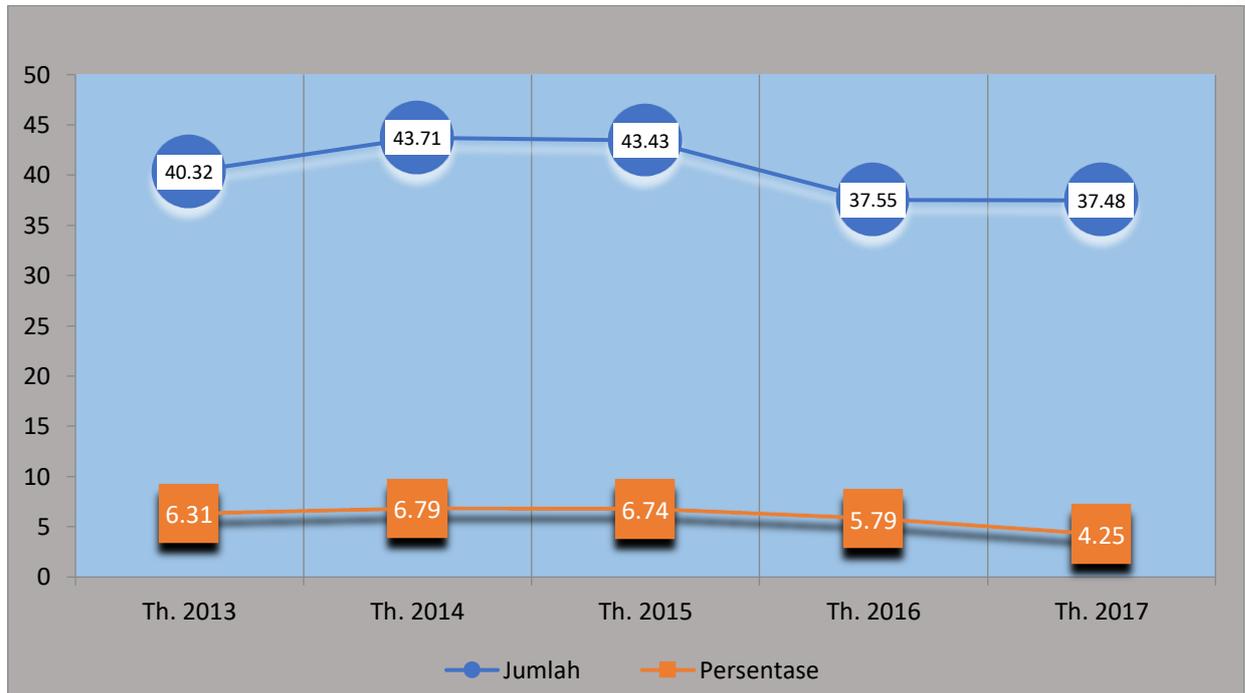


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, penduduk digolongkan menjadi dua kelompok besar, yakni penduduk miskin dan penduduk tidak miskin menurut pengeluaran perkapita per bulannya. Pada periode tahun 2013-2014, penduduk miskin di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Sedangkan mulai tahun 2015 hingga 2017, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan. Penduduk miskin tahun 2015 ada sebanyak 43,43 ribu atau mengalami laju penurunan sebesar 0,64 persen dibandingkan tahun 2014. Kemudian di tahun 2016 jumlah penduduk miskinnya menurun lagi menjadi menjadi 37,55 ribu dengan laju penurunan sebesar 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pola yang sama juga terjadi pada angka persentase penduduk miskin, dimana sejak tahun 2015 persentasenya mulai menurun dan menurun lagi di tahun 2017. Pola jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng nampak pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 2.9

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017

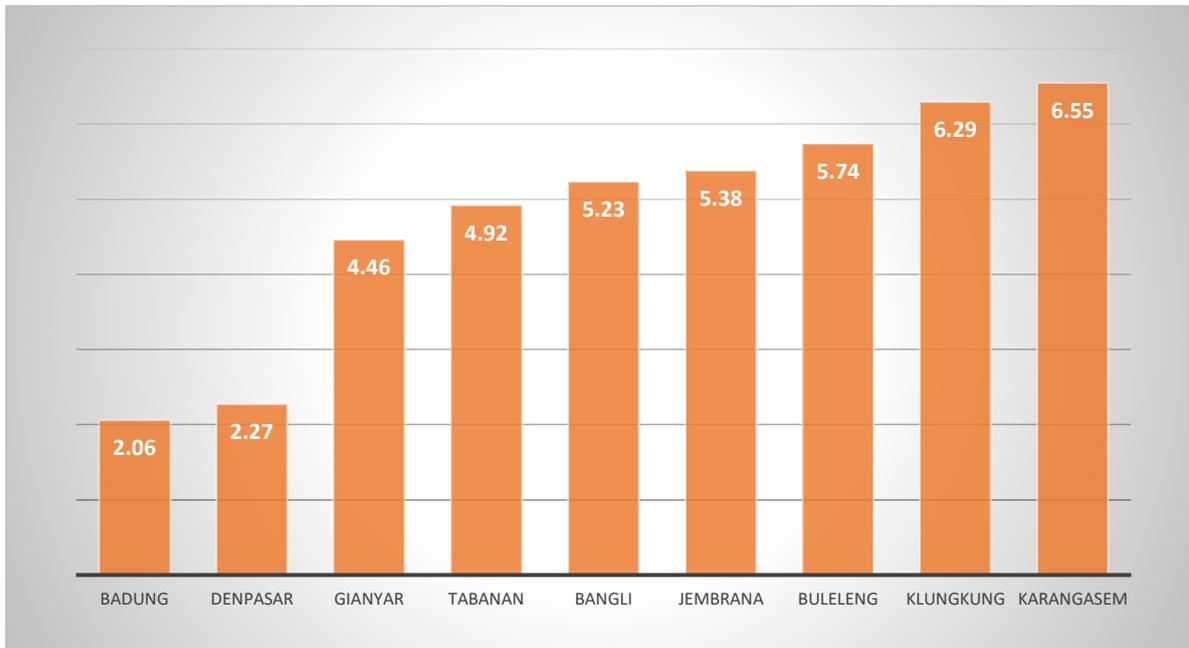


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Kendati pengendalian kemiskinan di Kabupaten Buleleng telah menunjukkan hasil yang positif. Akan tetapi masih ada hal lain yang perlu dicermati yaitu posisi atau ranking kemiskinan di Kabupaten Buleleng dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali. Pada kondisi terakhir (tahun 2017) ini terlihat bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Buleleng masih menempati posisi ketiga terbawah di Provinsi Bali. Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi adalah Kabupaten Karangasem (6,55 persen), Kabupaten Klungkung di urutan kedua (6,29) persen, dan Kabupaten Buleleng di posisi ketiga dengan persentase kemiskinan sebesar 5,74 persen.

Gambar 2.10

Persentase Penduduk Miskin menurut Kab/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Apabila dibandingkan antar wilayah kabupaten/kota se-Bali, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 merupakan jumlah terbanyak diantara kabupaten/kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Klungkung menduduki peringkat terakhir dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit yakni sekitar 11,15 ribu jiwa.

Gambar 2.11

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017 (Ribuan)



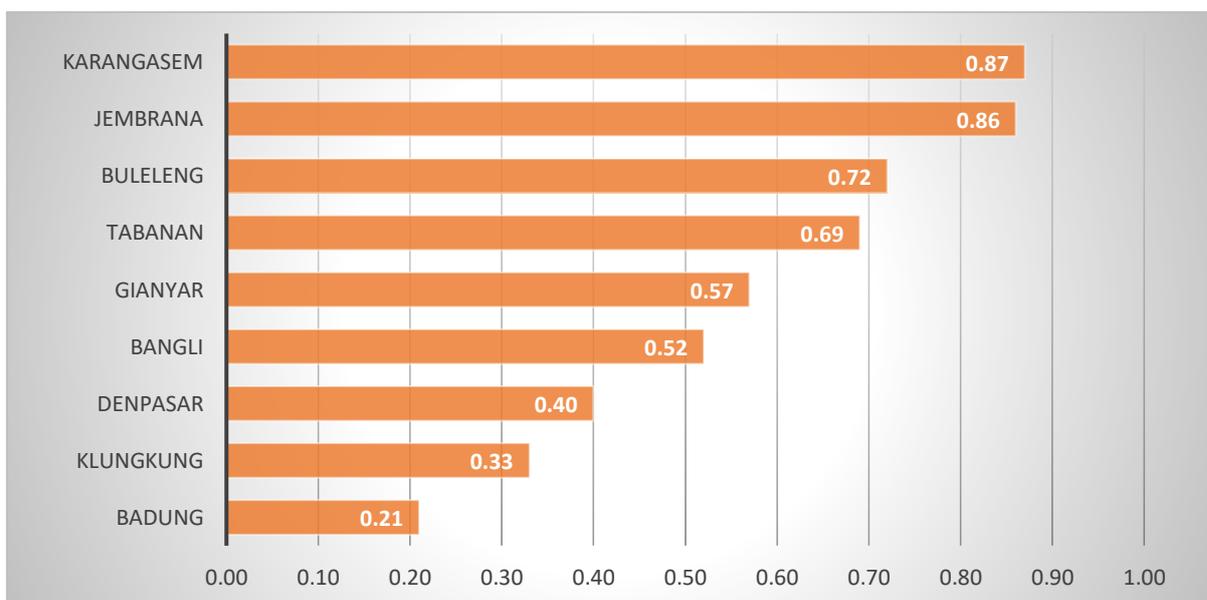
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Indikator lain yang juga cukup menarik untuk dicermati adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*). Melalui indikator ini dapat disimak tentang tingkat kedalaman kemiskinan yang terjadi disuatu wilayah dengan cara mengukur jarak antara rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Makin jauh jarak antara rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan menandakan bahwa kemiskinan yang disandang oleh penduduk miskin kondisinya makin buruk. Dikatakan buruk karena upaya untuk mengentaskan derajat kemiskinannya akan makin sulit. Demikian pula sebaliknya, jika jarak antara rata-rata pendapatan diantara penduduk miskin tersebut makin dekat dengan garis kemiskinan, maka upaya pengentasan kemiskinan akan lebih mudah dilakukan.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Buleleng di Tahun 2017 adalah sebesar 0,72 poin. Angka ini mengalami penurunan dibanding indeks yang terjadi di tahun 2016 dimana indeks saat itu hanya tercatat 0,75 poin. Penurunan ini mengindikasikan bahwa jarak antara rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan makin mendekat atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Buleleng semakin membaik/mudah dientaskan.

Posisi Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Buleleng menempati posisi tiga terendah diantara sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Posisi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.5 di bawah ini :

Gambar 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2017



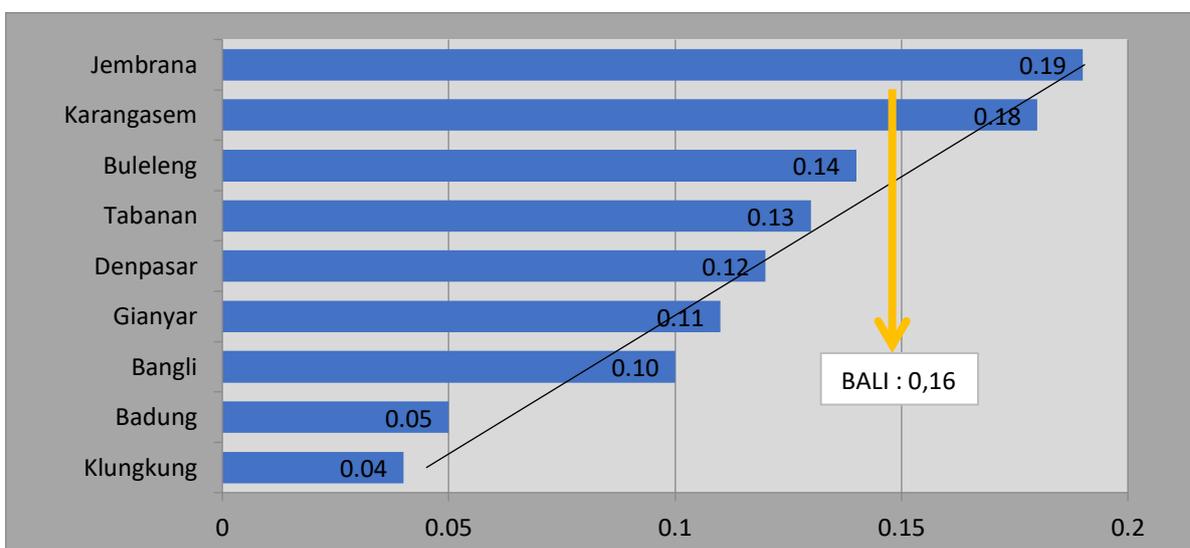
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Selain indikator kedalaman kemiskinan, terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesenjangan (disparitas) pendapatan yang terjadi antar penduduk miskin. Indikator ini disebut dengan **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index)**. Indikator ini memeberikan gambaran tingkat keparahan kemiskinan, dimana disparitas yang makin besar mengindikasikan kondisi kemiskinan yang makin parah, demikian pula sebaliknya kondisi kemiskinan dapat dikatakan membaik jika disparitas pendapatan diantara penduduk miskin tersebut makin kecil.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buleleng di Tahun 2017 menunjukkan angka 0,14 poin. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2016 yang saat itu Indeks Keparahannya berada pada angka 0,15 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin di Buleleng pada dua kurun waktu, menunjukkan kondisi membaik.

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng kendati masih cukup tinggi namuncukup membanggakan karena Tingkat Keparahan Kemiskinan di buleleng berada di bawah rata-rata Provinsi Bali (rata-rata Bali 0.16). Kondisi ini perlu dipertahankan, dengan tetap melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan yang mengarah pada pendapatan di penduduk dengan kategori paling miskin. Upaya-upaya tersebut misalnya dengan cara memeberikan dana atau modal kerja/usaha kepada pendududuk miskin, serta upaya peningkatan kualitas/skill melalui di bidang pendidikan/keterampilan disertai pendam-pingan yang terus menerus.

Gambar 2.13
Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

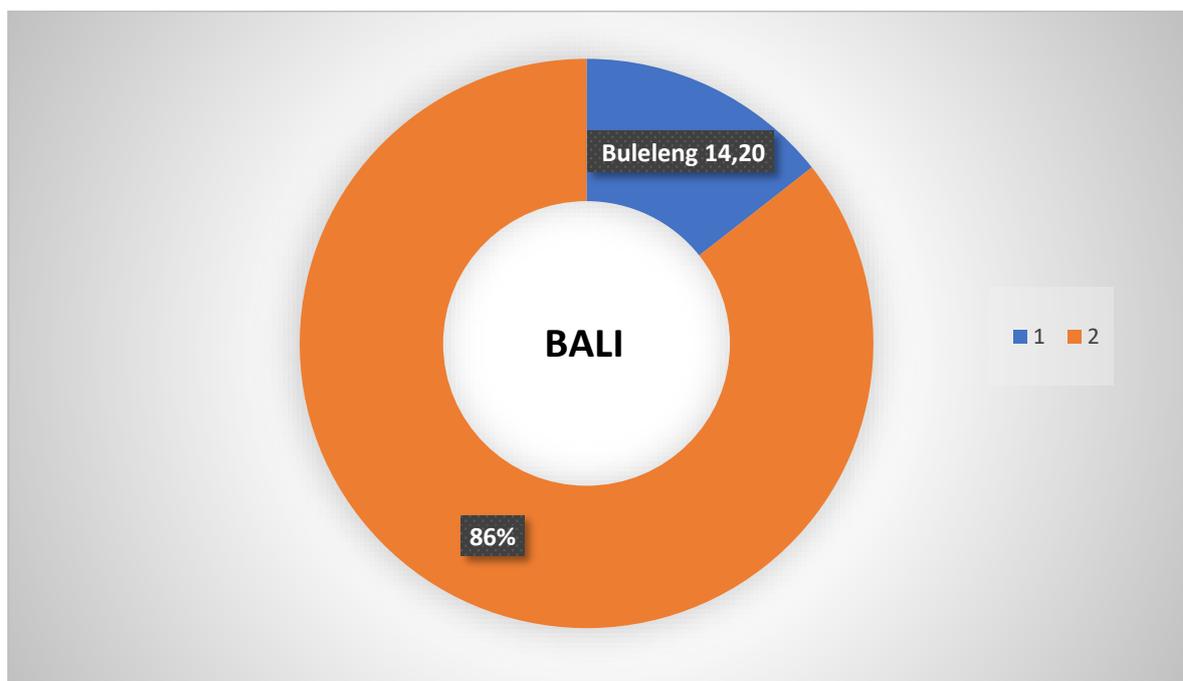
2.3.2 Laju Petumbuhan Ekonomi Buleleng

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan positif dari kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu gambaran pertumbuhan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi.

Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sebesar 30,59 Triliun rupiah, meningkat 2,84 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang mencapai 27,75 Triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada tahun 2017, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,20 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali.

Gambar 2.14

Kontribusi PDRB Kabupaten Buleleng Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017 (%)

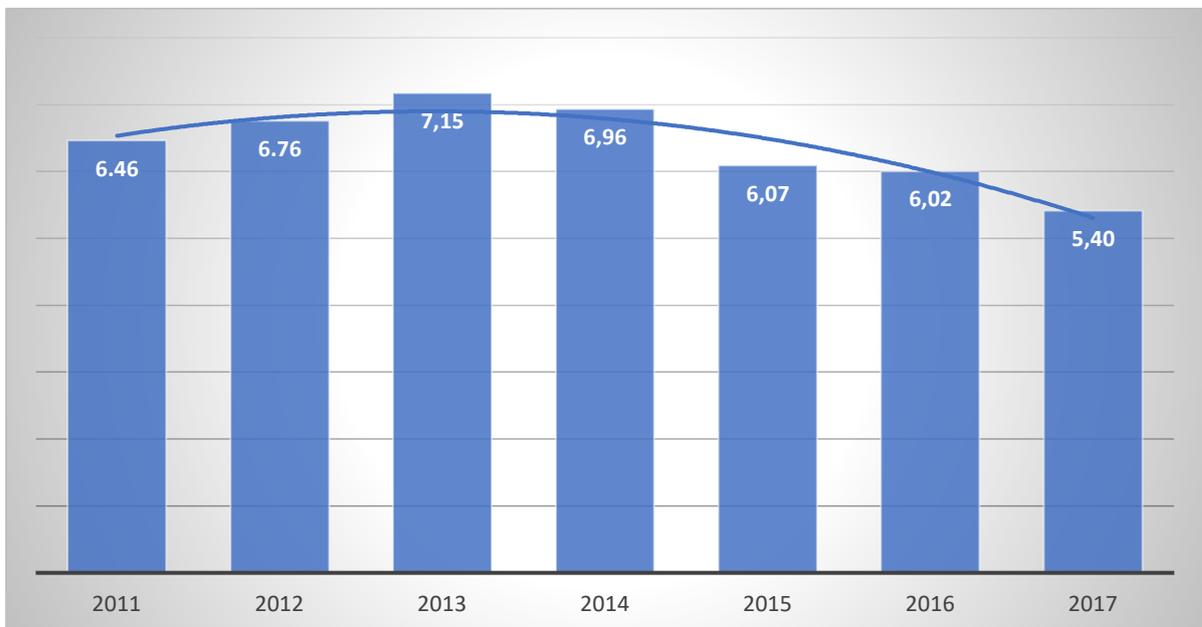


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

PDRB Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 mencapai 21,028 Triliun rupiah. Meningkat sebesar 1,08 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 19,950 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB secara riil ini dapat diartikan bahwa ekonomi Kabupaten Buleleng tumbuh sebesar 5,41 persen pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. Selama Tahun 2011-2013 Lajunya meningkat dan mencapai puncak di Tahun 2013 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,17 persen melebihi angka provinsi bali (6,69 persen). Dari tahun 2014 ke tahun 2017 masih tetap meningkat, akan tetapi lajunya menurun.

Gambar 2.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng, 2011 - 2017 (%)



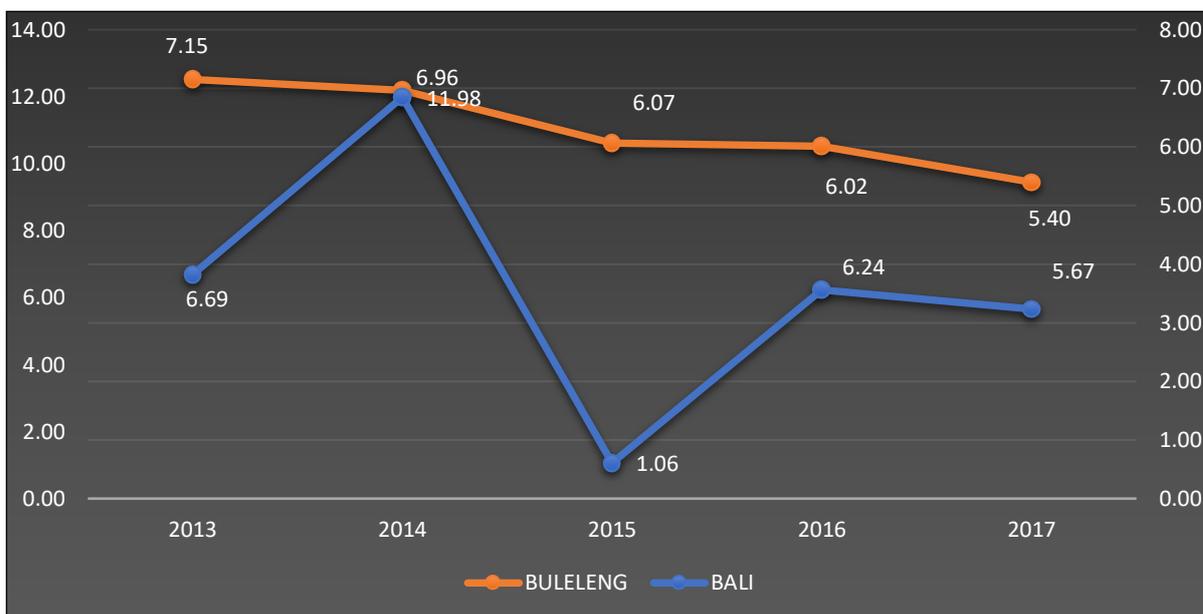
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Selama periode 2014-2017, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami perlambatan, hingga pada tahun 2017 mencapai 5,40 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Buleleng mengalami perlambatan, Kabupaten Buleleng patut berbangga karena masih mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tetap diatas 5 persen.



Gambar 2.16

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Buleleng dan Provinsi Bali, 2013– 2017 (%)

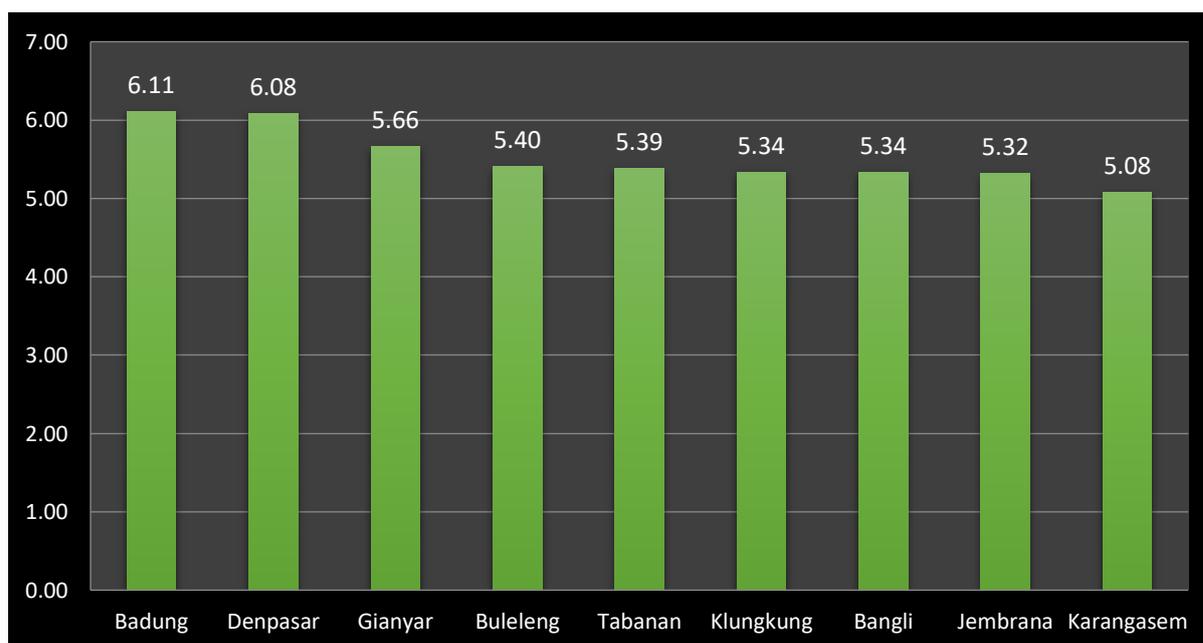


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 berada pada posisi ke empat diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi selama adalah Kabupaten Badung yang mencapai 6,11 persen, sementara yang terendah ada di kabupaten kerangasem.

Gambar 2.17

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017 (%)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

2.3.3 Distribusi Pendapatan Penduduk 40% Terbawah

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks, tidak hanya di kabupaten - kabupaten di Indonesia, bahkan di banyak Negara juga belum dapat mengatasi masalah ketimpangan tersebut.

Bank Dunia membagi penduduk menurut kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan yakni 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Dalam menilai pemerataan, perhatian difokuskan pada perkembangan pendapatan pada kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah. Bank Dunia menggunakan kriteria ketimpangan sebagai berikut :

- a. Jika 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatan total suatu daerah, maka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut dikategorikan tinggi.
- b. Jika 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima sebesar 12 - 17 persen dari pendapatan total suatu daerah, maka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut dikategorikan sedang.
- c. Jika 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan total suatu daerah, maka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut dikategorikan rendah.

Data Susenas 2015 menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Buleleng menikmati sekitar 20,29 persen dari total pendapatan di Kabupaten Buleleng. Menurut kriteria Bank Dunia, angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan rendah.

Penduduk pada kelompok pendapatan rendah ini sangat rentan terhadap perubahan iklim perekonomian di suatu daerah. Sering kali penduduk pada kelompok ini tidak dapat merasakan adanya ketimpangan karena merasa pendapatan mereka secara absolut meningkat dari waktu ke waktu. Namun apabila dihitung menurut porsi pendapatan yang mereka terima terhadap total pendapatan di suatu daerah, porsi pendapatan mereka ternyata semakin kecil. Sehingga tanpa terasa ketimpangan kesejahteraan di suatu daerah semakin lebar antara si kaya dan si miskin karena



pendapatan daerah hanya dinikmati oleh kelompok penduduk penduduk berpendapatan tinggi.

Disamping kriteria yang disampaikan oleh Bank Dunia, terdapat indikator lain yang juga dapat digunakan untuk menilai ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Indikator tersebut adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Formula yang digunakan dalam penghitungan gini ratio adalah :

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Dimana G = GR (*Gini Ratio*)

P = Persentase penduduk

Q = Persentase kumulatif pengeluaran

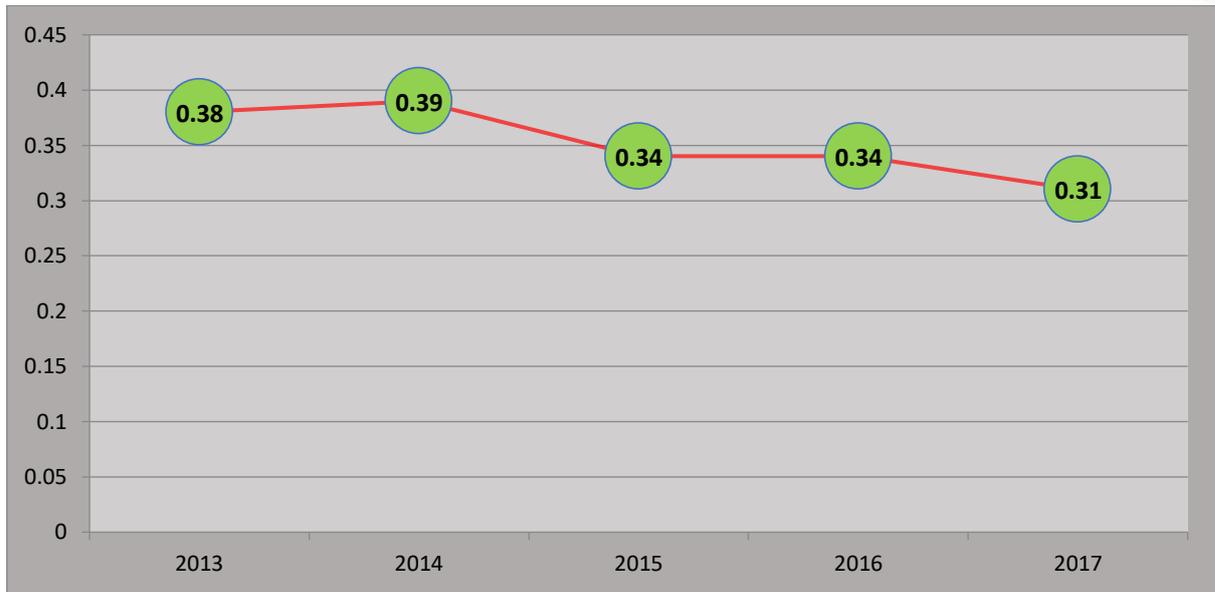
Nilai *Gini Ratio* berada antara 0 dan 1. Bila GR sama dengan Nol, berarti distribusi pendapatan amat merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Penentuan kategori ketimpangan pendapatan berdasarkan nilai gini rasio menurut Oshima menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tingkat ketimpangan rendah apabila nilai GR antara 0 – 0,3
- b. Tingkat ketimpangan sedang apabila nilai GR antara 0,3 – 0,5
- c. Tingkat ketimpangan tinggi apabila nilai GR lebih besar dari 0,5

Dengan formula di atas, Gini Ratio Buleleng tahun 2017 pemerataan pendapatannya berada dalam ketimpangan sedang yaitu dengan angka indeks sebesar 0,31 dimana angka ini terletak diantara 0,3 sampai 0,5. (Lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali yang tercatat sebesar 0.38).



Gambar 2.18
Gini Rasio Kabupaten Buleleng tahun 2013 - 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

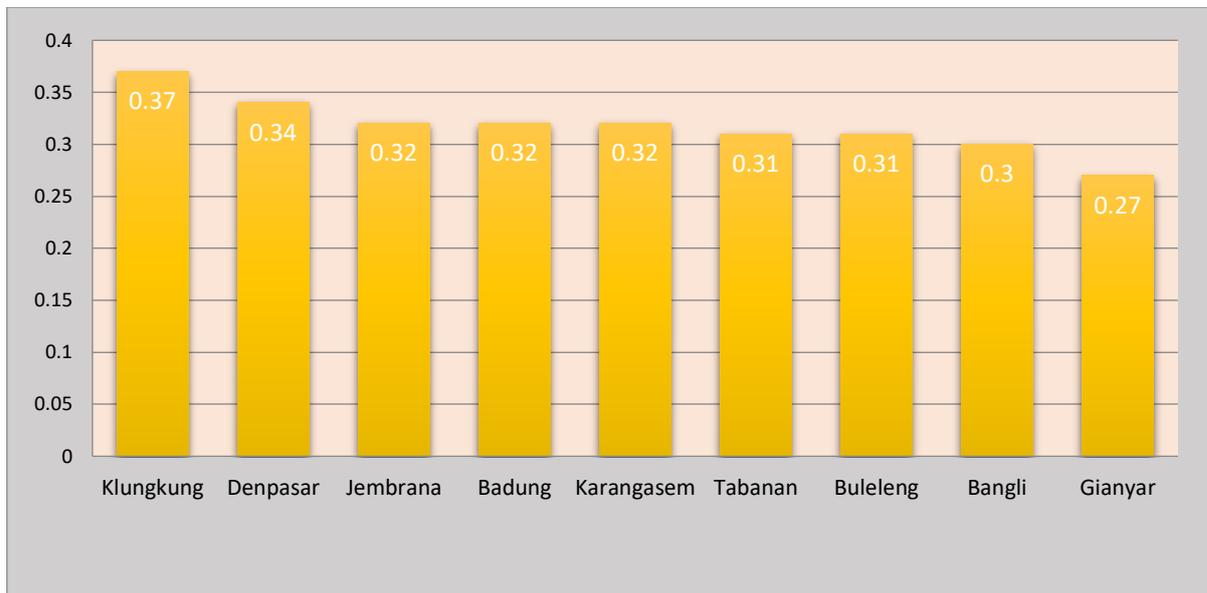
Berdasarkan analisis *Gini Ratio*, Fenomena ketimpangan pendapatan di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2014 hingga Tahun 2017 mengalami kecenderungan menurun dari 0,39 poin hingga menembus angka 0,31 poin. Fenomena baik ini perlu dipertahankan dan bahkan terus diminimalisir agar pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Kabupaten Buleleng semakin merata dirasakan oleh penduduk berpenghasilan 40 persen terbawah.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali, tingkat ketimpangan di Kabupaten Buleleng menempati urutan kelima paling timpang setelah Bangli, Klungkung, Denpasar, dan Tabanan. Meski demikian, secara umum kesembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali tergolong pada ketimpangan sedang.



Gambar 2.19

Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Tahun 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia pada dasarnya mencakup tiga komponen yang mendasar pada diri manusia yaitu peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk melihat sudah sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia terhadap ketiga komponen di atas. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Komponen “Peluang Hidup” dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; komponen “Pengetahuan” diukur dengan menghitung rata-rata lama sekolah dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah bagi penduduk berusia 7 tahun ke atas; Sementara komponen “Hidup Layak” diukur dengan menghitung pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli dalam rupiah).

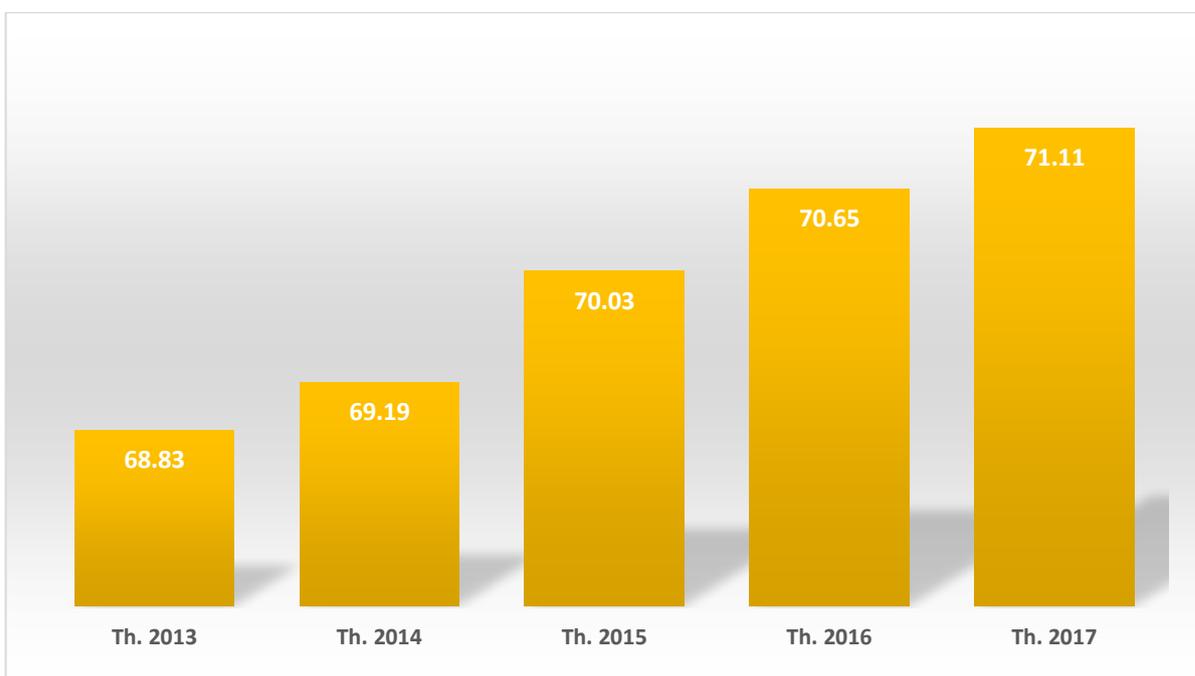
Sebagai kabupaten dengan wilayah yang paling luas di Provinsi Bali Buleleng mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian.



Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Buleleng. Meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM Kabupaten Buleleng lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada, maka lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Gambar 2.20

Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Selama lima tahun terakhir IPM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 sebesar 68,83 terus meningkat hingga ke angka 71,11 di tahun 2017. Dengan nilai IPM sebesar 71,11 Kabupaten Buleleng masuk dalam kategori wilayah dengan IPM level tinggi. Selain itu, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 mencapai 0,89 persen. Angka ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi kelima di wilayah Provinsi Bali setelah Kota Denpasar (0,41persen), Klungkung (0,48 persen), Karangasem (0,85 persen) dan Tabanan (0,88 persen).

Capaian nilai dan laju pertumbuhan IPM yang relatif tinggi tersebut cukup membanggakan, namun ada baiknya disimak beberapa indikator pembentuk IPM agar dapat diperoleh gambaran yang lebih detail menjurus pada permasalahan dasarnya sehingga upaya perbaikan kedepan dapat mengarah pada sasaran yang lebih tepat.

Peringkat IPM selama tiga tahun terakhir (2014-2017) Kabupaten Buleleng masih tetap menempati peringkat kelima. Capaian IPM tertinggi pada tahun 2017 ditempati oleh Kota Denpasar yang mempunyai nilai 83,01. Sementara di posisi terakhir ditempati oleh Kabupaten Karangasem yang mencapai nilai 65,57.

Tabel 2.7

Indeks Pembangunan Manusia menurut Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014 - 2017

Kabupaten/ Kota	Tahun				Peringkat			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kota Denpasar	81,65	82,24	82,58	83,01	1	1	1	1
Badung	77,98	78,86	79,8	80,54	2	2	2	2
Gianyar	74,29	75,03	75,7	76,09	3	3	3	3
Tabanan	72,68	73,54	74,19	74,86	4	4	4	4
Buleleng	69,16	70,03	70,65	71,11	5	5	5	5
Jembrana	68,67	69,66	70,38	70,72	6	6	6	6
Klungkung	68,3	68,98	69,31	70,13	7	7	7	7
Bangli	65,75	66,24	67,03	68,24	8	8	8	8
Karangasem	64,01	64,68	65,23	65,57	9	9	9	9
BALI	72.48	73.27	73,65	0	-	-	-	-

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Dengan capaian kabupaten Buleleng yang berada pada posisi kelima, merupakan tantangan bagi Kabupaten Buleleng untuk lebih berorientasi pada pembangunan manusia kedepannya. Karena manusia adalah kekayaan bangsa yang



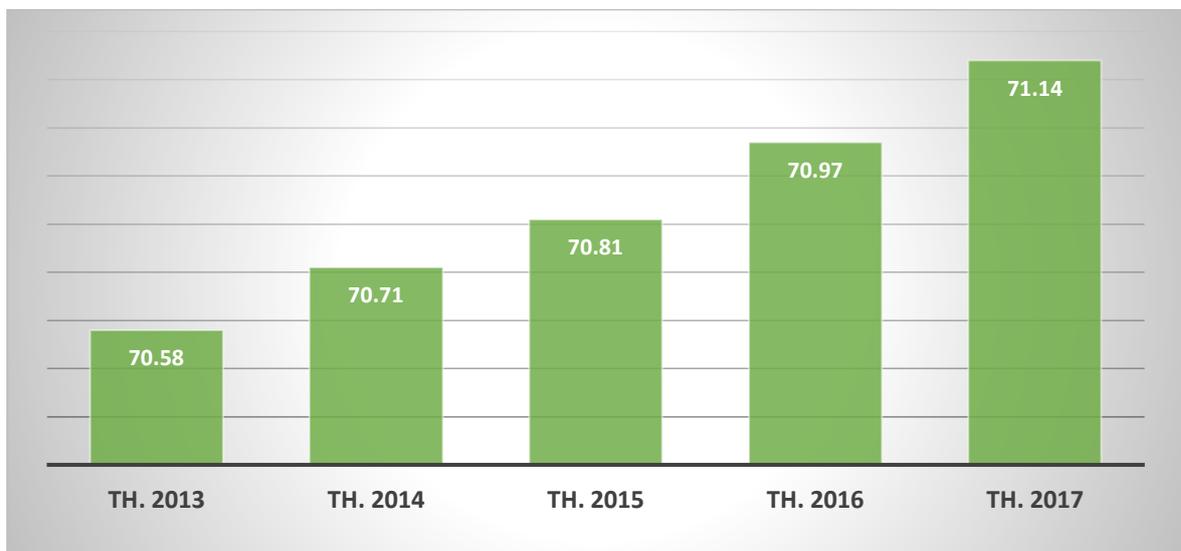
sesungguhnya dalam proses pembangunan daerah. Upaya peningkatan IPM tidak dapat dilakukan secara instan, akan tetapi dengan mensinergikan antara pembangunan ekonomi, perbaikan derajat kesehatan serta peningkatan pengetahuan dan pendidikan penduduk Buleleng. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana profil beberapa komponen pembentuk IPM di Kabupaten Buleleng.

2.3.5 Komponen Peluang Hidup

Indikator yang digunakan untuk mengukur peluang hidup adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Buleleng selama tujuh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yaitu dari 70,58 pada tahun 2013 terus meningkat hingga mencapai 71,14 pada tahun 2017. Peningkatan angka harapan hidup mencerminkan makin meningkatnya kualitas hidup terutama kesehatan penduduk Buleleng. Akan tetapi angka harapan hidup Kabupaten Buleleng masih relatif lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Bali yang sebesar 71,46. Jika dibandingkan peluang hidup penduduk diantara kabupaten/kota lainnya di Bali maka Kab. Buleleng berada pada peringkat keenam.

Gambar 2.21
Angka Harapan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

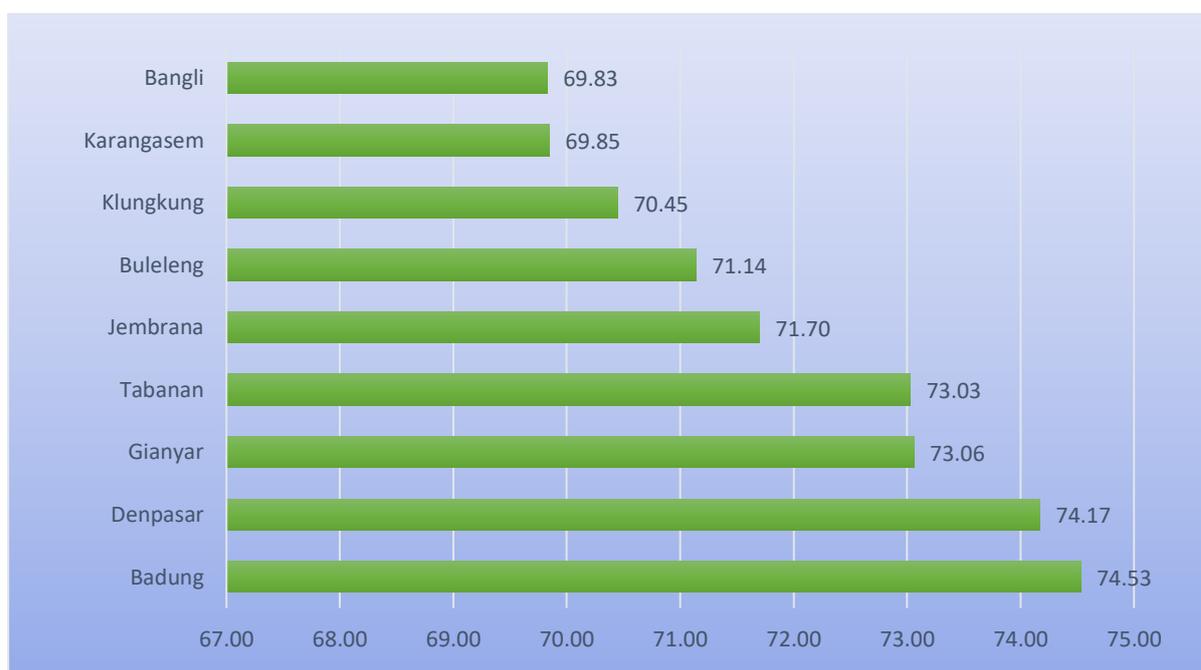


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Indikator Angka Harapan Hidup dapat merefleksikan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, semakin tinggi capaian pembangunan derajat kesehatan masyarakat, memberikan konsekuensi langsung pada naiknya angka harapan hidup penduduk. Oleh karena itu salah satu strategi dalam peningkatan angka harapan hidup adalah dengan peningkatan derajat kesehatan secara merata di Buleleng, seperti ; lingkungan yang sehat, pola hidup sehat, ketersediaan fasilitas kesehatan serta akses terhadap fasilitas.

Gambar 2.22

Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

2.3.6 Komponen Pengetahuan

Komponen Pengetahuan, diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah dari penduduk berusia 7 tahun ke atas dan rata-rata Lama Sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Penjelasan kedua indikator tersebut sebagai berikut :

a. Harapan Lama Sekolah

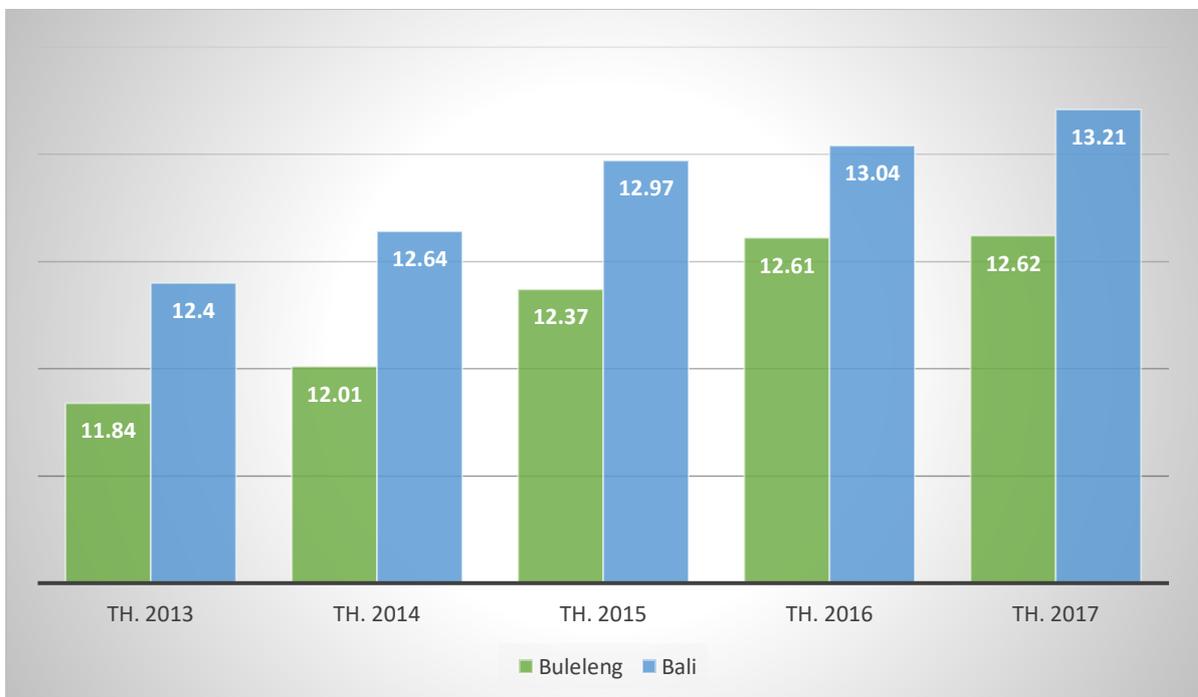
Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hasil penghitungannya dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa makin tinggi angka harapan lama sekolah maka semakin baik tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusianya.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Buleleng menunjukkan kemajuan yang cukup stabil, ini terlihat dari peningkatan angka harapan lama sekolah dari 11,84 pada tahun 2013 menjadi 12,62 pada tahun 2017. Dimana artinya angka harapan lama sekolah pada tahun 2017 untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas adalah 12,62 tahun atau setara tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas hingga diploma 1.

Gambar 2.23

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Buleleng dan Bali Tahun 2013 - 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Meskipun angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buleleng selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir namun peningkatan yang dicapai masih relatif rendah dibandingkan dengan peningkatan angka harapan lama sekolah Provinsi Bali. Angka harapan lama sekolah di Provinsi Bali pada tahun 2013 lebih tinggi hanya 0,56 poin dibandingkan dengan Buleleng. Akan tetapi selama kurun waktu lima tahun kemudian angka harapan lama sekolah Provinsi Bali telah mencapai 13.21 atau lebih tinggi 0,59 poin dibanding angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buleleng.

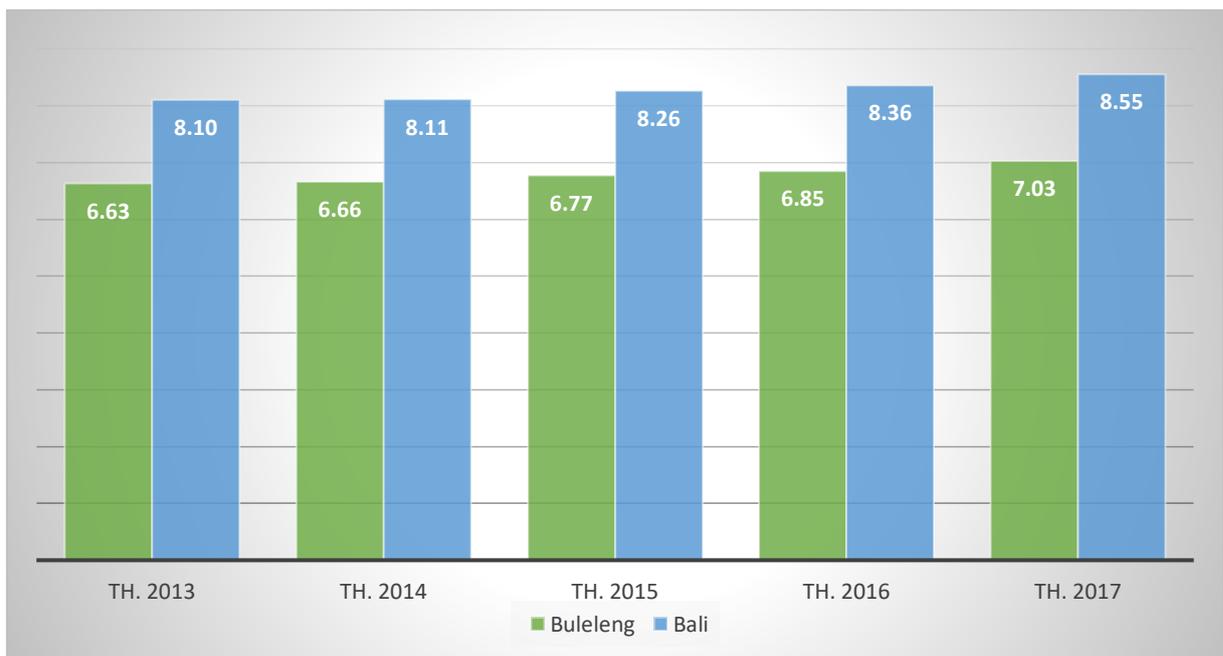
b. Rata-rata lama sekolah

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pendidikan di suatu daerah adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Tahun 2017 penduduk yang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Buleleng memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 7,03 tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Bali yang sebesar 8,55 tahun.

Gambar 2.24

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2013 - 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Kondisi ini menggambarkan Kabupaten Buleleng belum dapat memenuhi undang-undang pendidikan yang mencanangkan wajib belajar 9 tahun, karena capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buleleng hanya 7,03 tahun yang artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Buleleng hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SD sampai kelas 2 SMP, sehingga peningkatan

pendidikan di Kabupaten Buleleng masih perlu untuk digencarkan, peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan perlu diutamakan disamping perluasan dan kemudahan akses terhadap pendidikan.

2.3.7 Komponen Hidup Layak

Komponen ini didekati dengan kemampuan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dalam penghitungan IPM didekati dengan nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2017 mencapai 12,995 juta rupiah per kapita setahun. Namun jika dibandingkan dengan paritas daya beli Provinsi Bali secara umum dari tahun 2013 hingga 2017, nampak jelas terlihat kemampuan daya beli penduduk di Kabupaten Buleleng selalu berada di bawah kemampuan daya beli penduduk di Provinsi Bali.

Gambar 2.25

Paritas Daya Beli Kabupaten Buleleng Dan Provinsi Bali Tahun 2013 - 2017



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan daya beli penduduk adalah dengan aktifnya penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi rakyat seperti adanya kelompok usaha bersama, serta

peningkatan produktivitas pada komoditi unggulan dapat menggiatkan perekonomian rakyat yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli penduduk Buleleng.

2.4. KETENAGAKERJAAN

Tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah :

- Terwujudnya tenaga terampil dan professional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
- Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja.
- Pemerataan penyebaran tenaga kerja / penduduk.

Sedangkan sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
- Menurunnya jumlah pengangguran.
- Menurunnya jumlah perselisihan hubungan industrial / pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Meningkatnya masyarakat untuk bertransmigrasi.

2.4.1. Kondisi Umum Ketenagakerjaan Di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2013 - 2017

Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng berubah dari tahun ke tahun akan memicu adanya masalah sosial. Jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan kesempatan kerja mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi.

Tabel 2.8
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016 *	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Penduduk	633.900	642.300	746.720	811.923	811.923
2	Jumlah Tenaga Kerja	345.423	333.594	345.326	-	486.403
3	Angkatan Kerja	3.565.306	342.975	352.510	-	366.940

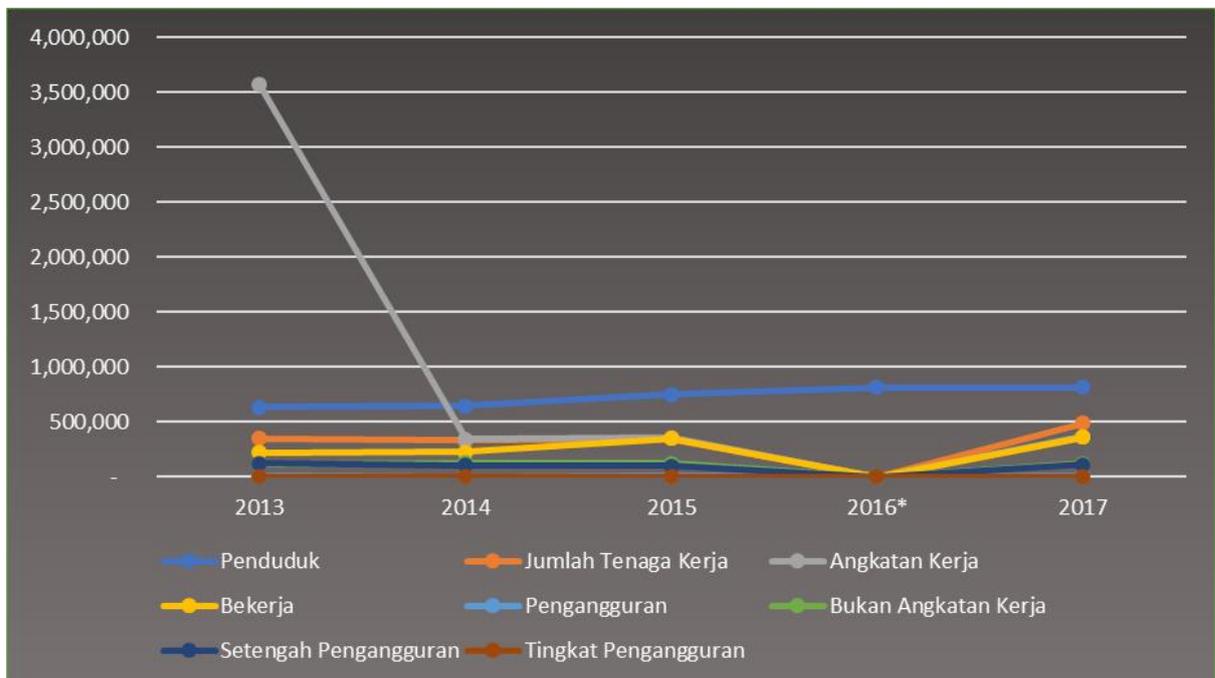


4	Bekerja	222.376	228.666	345.326	-	358.107
5	Pengangguran	7.603	9.920	7.184	-	8.883
6	Bukan Angkatan Kerja	114.029	128.574	124.210	-	119.463
7	Setengah Pengangguran	123.047	104.928	98.888	-	109.024
8	Tingkat Pengangguran	2,20%	2,90%	2,04%	-	2,41

SumberData :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

* : Tidak diadakan Sakernas

Gambar 2.26
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng



Sumber Data :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

* : Tidak diadakan Sakernas

2.4.2. Jumlah Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

Masalah pengangguran adalah masalah nasional tingginya angka pengangguran di Kabupaten Buleleng memerlukan penanganan bersama mulai dari sector hulu sampai hilir karena salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah adanya

angka pengangguran yang tinggi, untuk itulah diperlukan program yang sinergis dan berkerlanjutan dari semua sektor serta melibatkan stakeholder yang ada.

Tabel 2.9

Data Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng

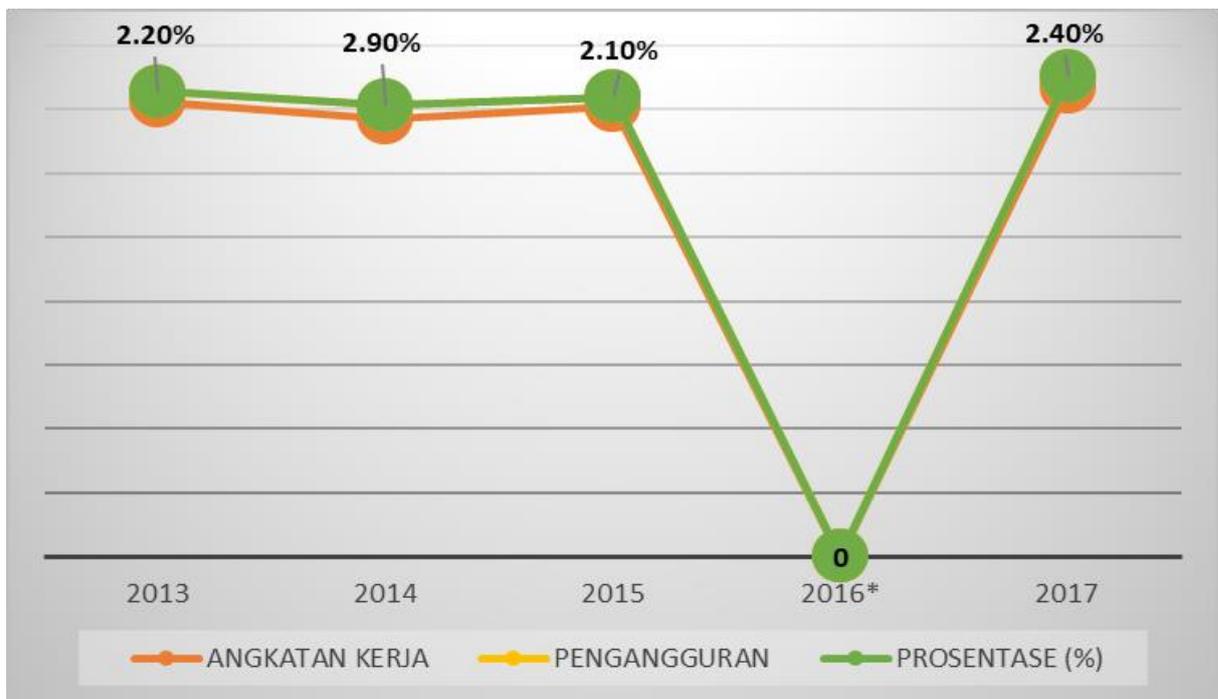
NO	TAHUN	ANGKATAN KERJA	PENGANGGURAN	PROSEN TASE (%)	KETERANGAN / PENJELASAN
1	2	3	4	5	6 ($4/3 \times 100\%$)
1	2013	356.306	7.603	2,20	$7.603 / 356.306 \times 100 = 2,20$
2	2014	342.975	9.920	2,90	$9.920 / 342.975 \times 100 = 2,90$
3	2015	352.510	7.184	2,10	$7.184 / 352.510 \times 100 = 2,10$
4	2016*	-	-	-	-
5	2017	366.940	8.833	2,40	$8.833 / 366.940 \times 100 = 2,40$

SumberData :Dinas Tenaga KerjaKabupatenBuleleng

* : Tidak diadakan Sakernas

Gambar 2.27

Data Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng



SumberData :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

* : Tidak diadakan Sakernas

2.4.3. Data Jumlah Perusahaan (Dunia Usaha) Di Kab. Buleleng Th. 2013 - 2016

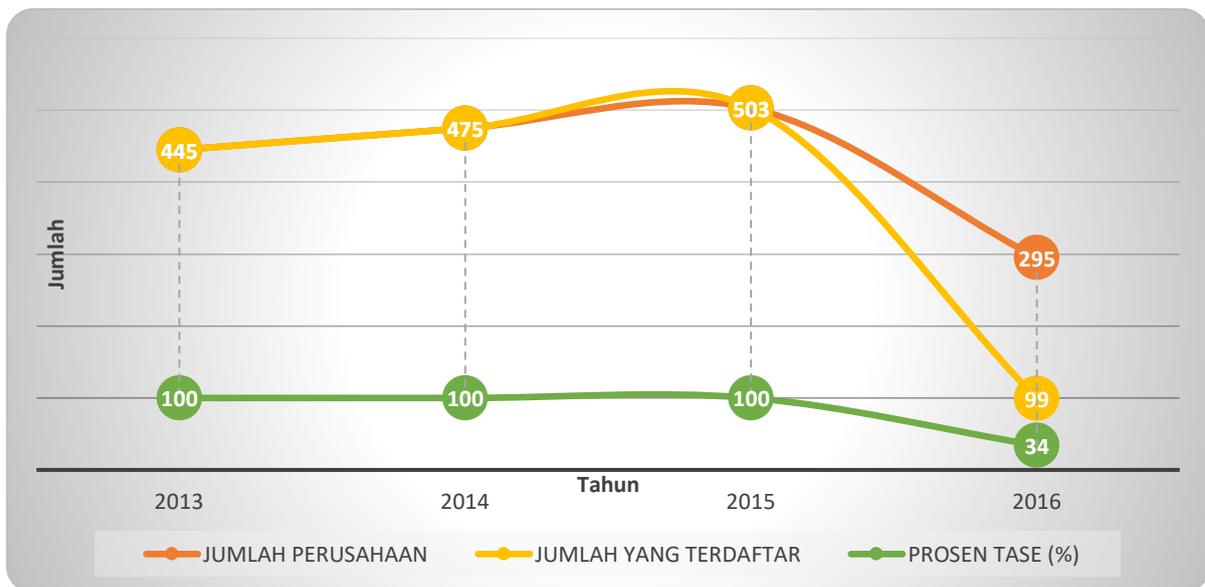
Perkembangan ekonomi di Kabupaten Buleleng di tahun 2016 semakin menggeliat sehingga banyak perusahaan yang belum mendaftarkan usahanya. Keberadaan Dunia Usaha diharapkan dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, hal ini juga akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian yang semakin baik yang pada nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Disamping itu juga Dunia Usaha dapat menjadi mitra kerja Pemerintah dalam upaya memberikan partisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Berikut kami sajikan jumlah perusahaan yang terdaftar dari tahun 2013- 2016 seperti Tabel berikut:

Tabel 2.10
Data Jumlah Dunia Usaha di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH YANG TERDAFTAR	PROSENTASE (%)	KETERANGAN / PENJELASAN
1	2	3	4	5	6 ($4/3 \times 100\%$)
1	2013	445	445	100	$445 / 445 \times 100 = 100\%$
2	2014	475	475	100	$475 / 475 \times 100 = 100\%$
3	2015	503	503	100	$503 / 503 \times 100 = 100\%$
4	2016	295	99	34	$295 / 99 \times 100 = 34\%$

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

Gambar 2.28
Laju Perkembangan Dunia Usaha (Perusahaan) di Kabupaten Buleleng



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

3.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

3.1.1 Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam pencapaian kinerja perencanaan maupun pelaksanaan tugas - tugas yang menjadi kewenangan SKPD. Pada hakekatnya perumusan dan penetapan visi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus disusun bersama, diwujudkan bersama sehingga visi yang dihasilkan menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselator kinerja bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun Visi serta didasarkan pada kondisi, analisis isu lingkungan dan karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng, maka ditetapkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2012-2017 adalah **”Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan, Pelayanan dan Kesejahteraan Penyandang Masalah Sosial Berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana”**.

❖ Makna Visi

Kata kunci dan makna yang terdapat dalam rumusan visi di atas adalah sebagai berikut :

- *Pemberdayaan* mempunyai makna suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses ketimbang sebuah pendekatan cetak biru. Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Secara



langsung, pendekatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menemukenali dan memprakarsai kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan, keuangan) mereka sendiri dengan cara yang berkelanjutan; (2) Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan program dan kegiatan pembangunan mereka sendiri; dan (3) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mereka;

- *Kesejahteraan/Sejahtera*, mengandung makna bahwa pemerintah dan komponen pembangunan lainnya dalam melaksanakan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan dinilai berdasarkan berbagai ukuran ataupun indikator. Kesejahteraan dilihat dari tingkat perkembangan ekonomi makro, indikasinya adalah semakin terciptanya lapangan kerja; laju pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, Perkembangan PDRB Daerah dan Perkapita yang semakin meningkat. Demikian juga indikasinya terlihat dari tingkat pendapatan riil dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat serta distribusi pendapatan yang semakin merata di masyarakat. Lebih tinggi tingkat pendapatan dan distribusinya lebih merata ke masyarakat, maka suatu daerah dikatakan lebih makmur dan dengan demikian lebih sejahtera. Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kesejahteraan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Daerah dikatakan sejahtera apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan masyarakat; demikian juga tercermin dari jumlah tenaga ahli/profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kesejahteraan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator derajat kesehatan yang indikasinya terlihat dari semakin meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatnya umur harapan hidup. Secara garis besar bahwa kesejahteraan yang semakin meningkat tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



yang semakin meningkat yang indikatornya mencakup: daya beli masyarakat; Kesehatan/Umur Harapan Hidup semakin meningkat serta Tingkat Pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dilihat dari lama pendidikan dan orang dewasa melek huruf. Daerah yang sejahtera ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan berkualitas, laju pertumbuhan penduduk yang semakin rendah, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

- *Pelayanan* mempunyai makna bagaimana memberikan kemudahan sehingga mereka/penyandang masalah sosial dapat mengakses apa yang menjadi kebutuhannya secara transparan, mudah dan cepat.
- *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* mempunyai makna setiap orang/masyarakat yang berada dibawah kondisi ideal dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- *Falsafah Tri Hita Karana* mempunyai makna tiga Faktor Penyebab Kebahagiaan yang mencakup hubungan manusia dengan Sang pencipta/Tuhan/Ida Shanghyang Widhi Wasa (Prahyanan); Hubungan Manusia dengan Manusia (Pawongan); serta hubungan Manusia dengan Lingkungannya (Palemahan). Intinya bahwa berbagai aspek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat senantiasa dilandasi hubungan yang harmonis baik antara pelaku pembangunan (manusia dengan manusia/Pawongan); pelaku pembangunan dengan lingkungan serta senantiasa mengedepankan pelestarian dan keberlanjutan (Manusia dengan Lingkungan/Palemahan); serta pelaku pembangunan harus senantiasa menyadari dan bersyukur bahwa apa yang ada di bumi adalah semuanya ciptaan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Manusia dengan Tuhan/Prahyanan).



3.1.2 Misi

Misi merupakan pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa daerah kepada suatu asset yang menjelaskan eksistensi SKPD yang bersangkutan. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumberdaya daerah sehingga pernyataan Visi dan Misi tersebut harus selaras dengan amanah yang diembannya.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program SKPD kepada seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*).

Mencermati makna Visi dan Misi di atas, maka Misi yang dirumuskan ataupun harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk mencapai visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
2. Melaksanakan deteksi dini dan pencegahan terhadap munculnya kerawanan sosial;
3. Pemetaan kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
4. Peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial dan lain-lain);
5. Pelesetarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan

Penjelasan Makna Misi :

- a. Misi yang pertama mempunyai makna bahwa melalui koordinasi dan kerjasama yang terpadu, akan terwujud penanganan masalah sosial yang terintegrasi dan terpadu antara kelembagaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengendalian/pencegahan terhadap timbulnya masalah kerawanan sosial;



- b. Misi kedua mempunyai makna bahwa untuk dapat diketahui dan tidak munculnya kerawanan sosial maka perlu dilakukan deteksi dan pencegahan terhadap masalah sosial;
- c. Misi yang ketiga mempunyai makna bahwa dengan adanya pemetaan kerawanan sosial akan teridentifikasi dan terinventarisasi mengenai jenis, lokasi, sumber kerawanan sosial yang mungkin muncul atau berkembang dimasyarakat ataupun di wilayah Kabupaten Buleleng;
- d. Misi yang keempat mempunyai makna bahwa masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupannya, dalam hal ini diberikan kemudahan, diberdayakan dan diberikan bantuan sehingga mampu mengatasi sendiri secara mandiri terhadap kondisi keluarga dan lingkungannya;
- e. Misi yang kelima mempunyai makna bahwa perlu ditingkatkan apresiasi dan kepedulian serta pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka perwujudan Visi dan Misi, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah. Mencermati dari tugas pokok serta rumusan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, maka ditetapkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun ke depan 2012 – 2017.

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
- 2) Mengetahui secara dini dan munculnya kerawanan sosial;
- 3) Mencegah terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 5) Pemetaan lokasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;



- 6) Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 7) Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial;
- 8) Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial;
- 2) Diketuainya/terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 3) Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial;
- 4) Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 5) Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
- 6) Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial;
- 7) Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial;
- 8) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengalokasian penanganan masalah-masalah sosial yang mendesak/urgen dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya bagi masyarakat penyandang masalah sosial serta upaya untuk mendukung untuk terwujudnya keadaan Buleleng yang sejahtera, adil dan lestari.

Strategi pembangunan yang dikembangkan untuk tercapainya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :



- a. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pendeteksian, pencegahan timbulnya masalah sosial
- b. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemetaan kerawanan sosial dalam upaya mendukung pendeteksian, pencegahan dan mitigasi timbulnya masalah sosial
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial
- e. Meningkatkan pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial.
- f. Meningkatkan pengkajian dan pendataan nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan;
- g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional pelayanan penanganan masalah sosial
- h. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian SDM dalam mendukung kinerja penanganan masalah sosial

3.1.4 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi internal dan eksternal kelembagaan dalam penanganan masalah sosial;
- b. Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penanggulangan bencana dan pasca bencana maupun masalah sosial lainnya;



- c. Menetapkan jalur dan ruang evakuasi bagi penduduk rawan terkena bencana;
- d. Pengkajian dan Pemetaan kerawanan sosial dalam rangka mitigasi bencana sosial atau bencana alam;
- e. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha dalam penanganan masalah sosial;
- f. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah sosial/masyarakat miskin;
- g. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial; dan
- h. Meningkatkan peran dan partisipasi kelembagaan dan masyarakat dalam penggalan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

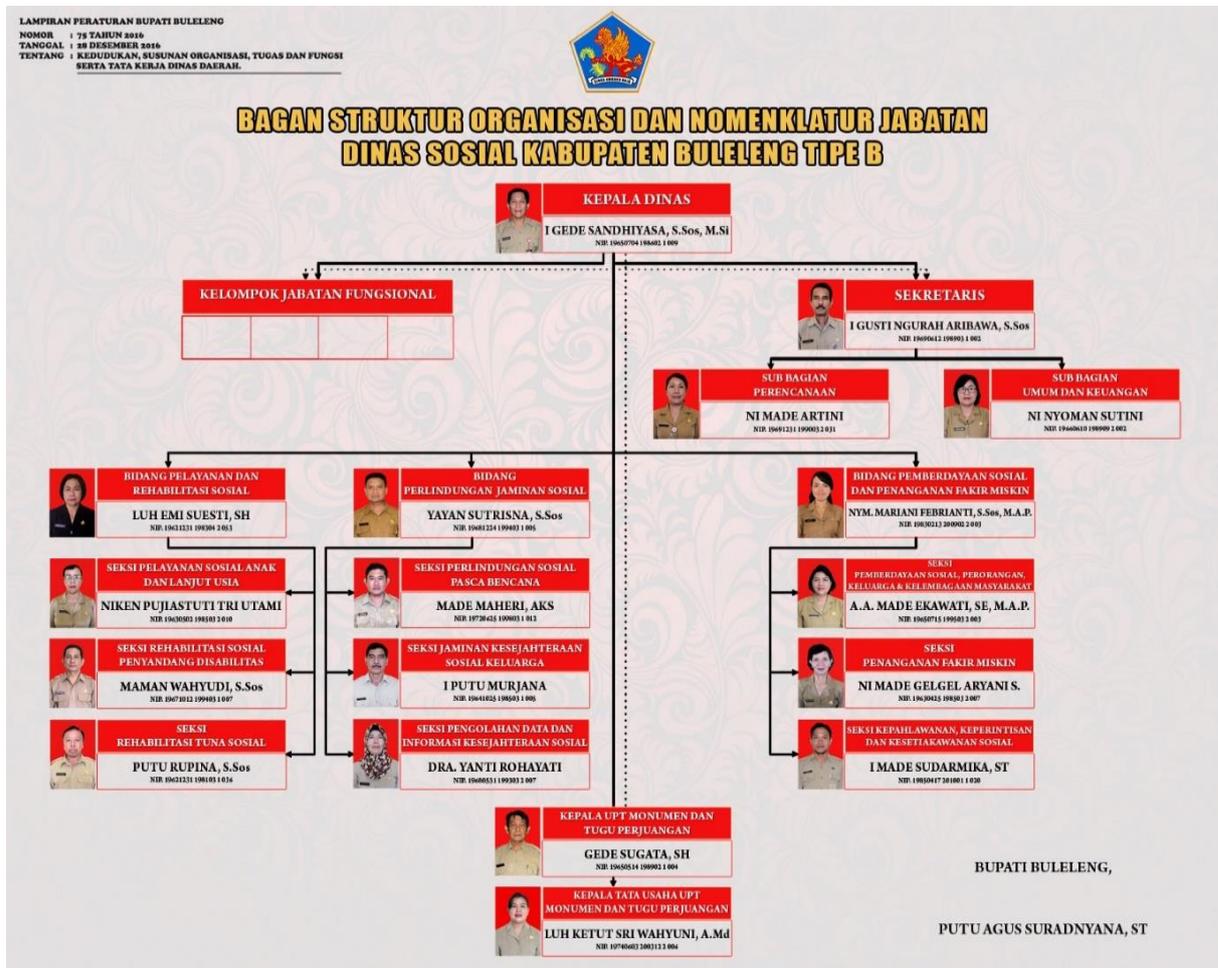
3.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan asset pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang urusan sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B, dimana sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara lebih lanjut juga diuraikan pada Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dimana Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memiliki *tugas pokok* membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial.



Adapun susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018



1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

4. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
 - a) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
 - b) Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga
 - c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan kelembagaan Masyarakat
 - b) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - c) Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (asset) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan asset yang dikelola dengan penjelasan sebagai berikut :

3.2.1 Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 132 orang terdiri dari 29 orang PNS di Dinas Sosial dan 2 orang PNS di UPT serta tenaga kontrak keseluruhan sebanyak 101 orang, dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :



1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Sampai Dengan Tahun 2018

Tabel 3.1
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	1	1
6	Pengatur (II/c)	2	2	4
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1	-	1
8	Penata Muda (III/a)	1	1	2
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	1	2
10	Penata (III/c)	1	2	3
11	Penata Tk. I (III/d)	6	3	9
12	Pembina (IV/a)	1	3	4
13	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
Jumlah		16	15	31

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

1.2. Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Sampai Dengan Tahun 2018.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebanyak 31 orang tentunya tidak memadai bila dibandingkan dengan beban kerja dan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja sebagai status kontrak kerja yang bertugas di bagian administrasi, Operator IT, Sopir, Tenaga Penjaga Perahu, Tenaga Cleaning Service dan tukang kebun, penjaga malam yang bertugas di Kantor Dinas, Monumen dan



Tugu Perjuangan yang menjadi tugas pemeliharaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Adapun jumlah Tenaga Kontrak Kerja yang dipekerjakan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Daftar Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tenaga Kontrak Administrasi	26	24	50
2	Tenaga Kontrak Sopir	5	-	5
3	Tenaga Kontrak Tukang Kebun / cleaning sevice	38	10	48
4	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	1	-	1
Jumlah		70	34	104

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng secara rinci dapat kami sampaikan seperti dalam Tabel berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin :

Tabel 3.3

Data Pegawai PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	4	9	13
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	2	3	5



4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2	2	4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	5	1	6
Jumlah		14	15	29

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

b. Menurut Jenjang Pendidikan (PNS)

Tabel 3.4

Data Pegawai PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretariat		4		9			13
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	2	2		1			5
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		3		1			4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial		3		3			6
Jumlah		3	12		14			29

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

c. Menurut Jenis kelamin (Tenaga kontrak)

Tabel 3.5

Data Pegawai Kontrak pada Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	11	12	23
2	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11	5	16



3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	6	6	12
4	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	12	3	15
Jumlah		40	26	66

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

d. Menurut Jenjang Pendidikan (Tenaga Kontrak)

Tabel 3.6

Data Pegawai Kontrak Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat		4	1	15	2		22
2	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		4		12			16
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		5		8			13
4	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial		5	2	8			15
Jumlah			18	3	43	2		66

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

e. Menurut Golongan Ruang :

Tabel 3.7

Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Golongan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas															1		1
2	Sekretariat					1	1	4		2	3		1		1			13



3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin										2	2	1					5
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial											3	1					4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial					1			1			2	2					6
Jumlah						1	1	4	1	2	4	3	9	4	1	1		29

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

3.2.2 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Jumlah PNS yang ada pada UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 2 orang, dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

- a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.8

Data Pegawai pada UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala UPT	1		1
2	Tata Usaha		1	1
Jumlah		1	1	2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018



b. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 3.9

Data Pegawai UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala UPT				1			1
2	Tata Usaha			1				1
Jumlah				1	1			2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

c. Menurut Golongan Ruang

Tabel 3.10

Data Pegawai UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Golongan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan																Jml						
		I				II				III				IV										
		a	b	C	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d							
1	Kepala UPT																1						1	
2	Tata Usaha																1							1
Jumlah																	1	1						2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018

3.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan urusan bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut :



Tabel 3.11
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Mobil	3	Unit
2	Sepeda motor :	25	Unit
3	Komputer : 1. PC 2. Laptop 3. Projector 4. Printer	4 25 3 23	Unit Unit Unit Unit
4	Meubeler : 1. Meja 2. Kursi 3. Brankas 4. Lemari 5. Meja Pingpong	117 245 3 3 1	Buah Buah Buah Buah Unit
5	Mesin Ketik	1	Unit
6	Filling cabinet	9	Unit
7	Mesin Hitung	0	Buah
8	Elektronik : 1. Televisi 2. Handycam 3. Kamera 4. AC 5. Faximili 6. Kulkas 7. Parabola 8. Reciver 9. Tape	3 2 11 18 2 1 0 0 1	Unit unit unit unit unit unit unit unit unit
9	Rak : 1. Rak Kayu 2. Rak TV	4 1	Buah Buah
10	Korden	5	Set
11	Jam Dinding	4	Buah
12	Papan White Board	7	Buah
13	Tabung Gas	1	Unit
14	Kompor Gas	1	Unit



3.3 TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

I. TUGAS :

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial.

II. FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas diatas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Di Bidang Sosial;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Sosial;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati.

III. URAIAN TUGAS :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Sosial, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang Sosial;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Sosial dan Lanjut Usia;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;



- h. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Sosial Pasca Bencana;
- k. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
- l. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pengolahan data dan informasi kesejahteraan sosial;
- m. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- p. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
- q. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Sosial serta UPT;
- r. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Sosial;
- s. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Sosial;
- t. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- u. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;



- v. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Sosial;
- w. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Sosial;
- x. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- y. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- a. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- b. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
- d. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Sosial;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Sosial;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Sosial;



- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial;
- m. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Dinas Sosial;
- n. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran Dinas dan UPT yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e. menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas;
- f. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial;
- i. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);



- j. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Sosial;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Dinas Sosial;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian dilingkungan Dinas Sosial serta UPT;
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi : penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezeting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- h. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i. menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Sosial;
- j. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dilingkungan Dinas Sosial;



- k. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Sosial;
- l. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- m. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi: penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- n. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi, dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba (korban penyalahgunaan Napza), pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immuno deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak



kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar, anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus dan Lanjut usia terlantar ;

- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendataan, inventarisasi, pemberian bimbingan sosial dan bimbingan teknis, melatih, pemberian bantuan sosial, pemberian santunan hidup, rehabilitasi serta supervisi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, ekspenderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika (Napza), pengguna psikotropika sindromaketergantungan, orang dengan Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar, anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus dan lanjut usia terlantar dan tidak produktif ;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tugasnya kepada atasan ; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.1. SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA.

Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia, berdasarkan data dan program Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pendataan, menginventarisasi, seleksi, memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan bantuan sosial serta bimbingan kesejahteraan sosial terhadap anak balita terlantar, anak terlantar, anak



- yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pelayanan sosial lanjut usia;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);
 - g. mendata, dan menginventarisasi pemberian bantuan santunan hidup bagi anak terlantar dan lanjut usia yang tidak produktif luar panti ;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2. SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS.

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, berdasarkan data dan program pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan data dan menginventarisasi bahan dalam rangka pembinaan, penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental/bukan gila, tuna rungu, tuna wicara dan tuna rungu wicara ;
- e. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan penanganan eks penderita penyakit kronis (TBC, paru-paru dan penyakit kronis lainnya);
- f. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pendampingan dan melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti;
- g. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian bantuan santunan hidup/asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat luar panti ;
- h. mendata, menginventarisasi, memfasilitasi dan merekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat pemberi bantuan penyandang disabilitas dan penyakit kronis;



- i. mendata, menginventarisasi lembaga pendidikan/pelatihan para penyandang disabilitas;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.3. SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL.

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, berdasarkan data dan program pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mendata, menginventarisasi, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan rehabilitasi sosial dan mental penyandang tuna sosial (tuna susila, germo/mucikari, waria, LGBT, kelompok minoritas), eks narapidana, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, tokoh masyarakat, karang taruna di lingkungan rawan tuna sosial;
- e. melaksanakan penanganan rehabilitasi dan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap orang gila terlantar ;
- f. mendata dan menginventarisasi membina, membimbing serta pemulangan gelandangan dan pengemis;
- g. mendata, menginventarisasi, menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial tuna susila, orang dengan HIV/ AIDS, korban Napza;
- h. mendata, menginventarisasi, menyelenggarakan dan melaksanakan razia gelandangan, pengemis dan tuna susila;
- i. mendata dan menginvetarisasi pembinaan bimbingan sosial, motivasi dan rehabilitasi serta pelatihan keterampilan bagi eks narapidana ;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



4. BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL.

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembinaan, bantuan dan pengendalian perlindungan sosial terhadap korban bencana baik alam maupun sosial ;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban pasca bencana;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi perlindungan sosial bagi keluarga dalam keadaan darurat;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi, menyusun pedoman/petunjuk teknis dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi, pengembangan sumber daya manusia dan pendamping bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan mengembalikan orang terlantar ketempat asal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi, mengevaluasi dan melaksanakan penguburan mayat terlantar;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- m. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga



- sangat miskin, pekerja sektor informal dan pekerja mandiri, melalui program keluarga harapan sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan/pemutahiran data, pengolahan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) berskala Kabupaten ;
 - o. memfasilitasi dan melaksanakan pengelolaan, verifikasi dan validasi data fakir miskin, data penerima program perlindungan dan jaminan sosial serta informasi kesejahteraan sosial berskala Kabupaten ;
 - p. memfasilitasi dan melaksanakan Penyuluhan Sosial dibidang usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan informasi pengembangan kesejahteraan sosial;
 - q. memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
 - r. memfasilitasi penyiapan bahan, data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.1. SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL PASCA BENCANA.

Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana, berdasarkan data dan program pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembinaan, bantuan dan pengendalian perlindungan sosial terhadap korban bencana baik alam maupun sosial ;
- e. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban pasca bencana;



- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. mendata dan menginventarisasi perlindungan sosial bagi keluarga dalam keadaan darurat;
- h. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan menyusun pedoman/petunjuk teknis dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial;
- i. mendata, menginventarisasi dan pengembangan sumber daya manusia bidang perlindungan sosial;
- j. mendata, menginventarisasi dan mengembalikan orang terlantar ketempat asal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- k. mendata, menginventarisasi, mengevaluasi dan melaksanakan penguburan mayat terlantar;
- l. melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2. SEKSI JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA.

Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga, berdasarkan data dan program Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mendata, menginventarisasi, menyusun pedoman/ petunjuk teknis dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan jaminan kesejahteraan sosial keluarga melalui program keluarga harapan ;
- e. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga sangat miskin, pekerja sektor informal dan pekerja mandiri, sesuai peraturan perundang-undangan;



- f. mendata, menginventarisasi, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia serta pendamping bidang jaminan kesejahteraan sosial ;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.3. SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan sosial, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, berdasarkan data dan program Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan blanko pendataan terhadap data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e. melaksanakan pendataan/pemutahiran data, pengolahan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) berskala Kabupaten ;
- f. melaksanakan pengelolaan verifikasi dan validasi data fakir miskin, data penerima program perlindungan dan jaminan sosial serta informasi kesejahteraan sosial berskala Kabupaten ;
- g. melaksanakan Penyuluhan Sosial dibidang usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan informasi pengembangan kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
- i. menyiapkan bahan dan data dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menginformasikan hasil pelaksanaan kegiatan dalam usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



5. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi peyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis motivasi, bimbingan sosial, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosia I(PSKS) dan organisasi sosial;
- g. memfasilitasi dan memeberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan izin bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan sosial/penyelenggara undian gratis berhadiah berskala Kabupaten ;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penertiban dan pengawasan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan sosial dan bantuan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada di lingkungan perkotaan, pedesaan dan pesisir yang kurang layak huni/kumuh;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan sosial dan bantuan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin,



keluarga rentan, kelompok/keluarga muda mandiri dan perempuan rawan sosial ekonomi;

- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.1. SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial dan bantuan sosial serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, pilar-pilar partisipasi



masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;

- g. mendata, menginventarisasi melaksanakan bimbingan, pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pendirian, perizinan, pendaftaran yayasan dan operasional terhadap panti sosial, lembaga kesejahteraan sosial, tempat penitipan anak dan kelompok bermain;
- h. mendata, menginventarisasi dan memverifikasi pemberian bantuan sosial dan rujukan donator /penyumbang terhadap yayasan sosial dan panti sosial;
- i. mendata, memverifikasi, mengkoordinasi, memproses dan menerbitkan rekomendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah berskala Kabupaten ;
- j. mendata, menginventarisasi, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pengumpulan uang dan barang melalui sumbangan dana masyarakat, corporate social responsibility dan undian berhadiah;
- k. mendata, menginventarisasi, melaksanakan pengendalian dan pengawasan dana sosial dan undian berhadiah;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2. SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN.

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun rencana pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
- e. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan tugas;



- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan usaha-usaha kesejahteraan sosial fakir miskin;
- g. mendata, menginventarisasi, dan membina pemberdayaan usaha kesejahteraan sosial (UKS) berbasis masyarakat desa;
- h. mendata, menginventarisasi, membina dan motivasi pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi melalui pemerdayaan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP);
- i. mendata, menginventarisasi, membina, memberdayakan dan melaksanakan pemberian bantuan stimulant melalui kelompok usaha bersama (KUBE) serta perumahan layak huni kepada keluarga fakir miskin;
- j. melaksanakan pemberian bantuan sosial dan santunan kematian bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin ;
- k. memberikan bimbingan sosial, pemberdayaan sosial dan pendampingan guna meningkatkan pelayanan sosial fakir miskin;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.3. SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, berdasarkan data dan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- e. mendata, menginventarisasi para veteran dan keluarga veteran;



- f. mendata, menginventarisasi perlengkapan/sarana kerja dan melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Museum Perjuangan dan Monumen/ Tugu Perjuangan lainnya;
- g. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pembinaan kepahlawanan bagi generasi muda;
- h. mendata menginventarisasi dan melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan printis kemerdekaan;
- i. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian bantuan/ penghargaan bagi veteran / keluarga veteran;
- j. melaksanakan memonitor usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan;
- k. melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan monumen dan tugu pahlawan;
- l. melaksanakan peringatan hari Pahlawan, Napak Tilas Perjuangan Pahlawan I Gusti Ngurah Rai, HUT Monumen Bhuana Kerta dan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional (BBKS);
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



4.1 URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial adalah Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten.

Beberapa jenis pelayanan dasar bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna susila khususnya gelandangan pengemis dan perlindungan jaminan sosial tanggap darurat korban bencana di Kabupaten Buleleng, sehingga jenis - jenis pelayanan dasar tersebut merupakan langkah strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Buleleng.

4.2 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.



Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Buleleng Tahun 2017

No	Jenis PMKS	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak	135	95	230
2	Anak Terlantar (AT)	Anak	956	698	1.654
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Anak	36	4	40
4	Anak Jalanan	Anak	24	4	28
5	Anak Dengan Kedissabilitas (ADK)	Anak	528	360	888
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	Anak	4	1	5
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	3	4	7
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.745	2.766	5.511
9	Penyandang Disabilitas	Orang	2.783	1.874	4.657
10	Tuna Susila	Orang	0	26	26
11	Gelandangan	Orang	7	6	13
12	Pengemis	Orang	0	3	3
13	Pemulung	Orang	66	18	84
14	Kelompok Minoritas	Orang	34	0	34
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	412	5	417
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	7	6	13
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	9	3	12
18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	3	11	14
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	19	2	21
21	Korban Bencana Alam	Orang	-	-	2.110



22	Korban Bencana Sosial	Orang	3	1	4
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	0	4.225	4.225
24	Fakir Miskin (FM)	KK	22.387	16.625	38.012
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	69	13	82

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3 JENIS - JENIS PELAYANAN DASAR DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Jenis - jenis pelayanan dasar yang merupakan langkah strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

4.3.1 Anak Terlantar

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriterianya adalah sebagai berikut :

- Berasal dari keluarga fakir miskin;
- Anak yang dilalaikan oleh orangtuanya; dan
- Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 4.2.
Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gerokgak	179	97	276	211	114	325	210	112	322	30	31	61	111	191	302
2	Seririt	122	106	228	127	110	237	129	114	243	20	23	43	94	180	274
3	Busungbiu	37	27	64	36	24	60	38	25	63	-	-	-	15	23	38
4	Banjar	95	95	190	98	93	191	96	90	186	5	6	11	83	118	201
5	Sukasada	127	81	208	156	87	243	153	85	238	-	18	18	114	120	234
6	Buleleng	100	59	159	147	122	269	147	122	269	4	11	15	143	118	261

7	Sawan	113	72	185	73	67	140	76	67	143	-	-	-	80	48	128
8	Kubutambahan	66	41	107	69	49	118	63	47	110	-	-	-	89	33	122
9	Tejakula	37	24	61	39	32	71	41	29	70	-	-	-	40	30	70
Jumlah		876	602	1.478	956	698	1.654	953	691	1.644	59	89	148	769	861	1630

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.2 Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan;
- Terlantar secara psikis, dan sosial.

Tabel 4.3.

Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gerokgak	439	587	1.026	451	616	1.067	455	613	1.068	104	200	304	451	496	947
2	Seririt	336	581	917	264	648	912	242	577	819	150	123	273	315	427	742
3	Busungbiu	82	182	264	74	162	236	74	162	236	74	162	236	211	304	515
4	Banjar	140	223	363	139	221	360	135	218	353	135	218	353	321	275	596
5	Sukasada	242	477	719	261	529	790	262	530	792	262	530	792	561	262	823
6	Buleleng	273	511	784	1.774	3.638	5.412	286	639	925	286	639	925	467	386	853
7	Sawan	129	314	443	148	379	527	145	377	522	145	377	522	189	282	471
8	Kubutam bahan	141	311	452	87	282	369	88	267	355	88	267	355	58	281	339
9	Tejakula	68	168	236	64	164	228	63	162	225	63	162	225	172	53	225
Jumlah		1.850	3.354	5.204	3.262	6.639	9.901	1.750	3.545	5.295	1.307	2.678	3.985	2.745	2.766	5.511

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.3 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh



dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Tabel 4.4.

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Gerokgak	568	371	939	522	405	927	391	373	764	477	306	783	477	306	783
2.	Seririt	402	286	688	360	325	685	382	241	623	377	257	634	377	257	634
3.	Busungbiu	195	126	321	181	151	332	167	93	260	164	93	257	164	93	257
4.	Banjar	277	202	479	268	189	457	270	177	447	268	185	453	268	185	453
5.	Sukasada	388	253	641	364	258	622	398	282	680	395	270	665	395	270	665
6.	Buleleng	321	232	553	278	243	521	297	295	592	295	222	517	295	222	517
7.	Sawan	299	212	511	302	197	499	270	199	469	258	183	441	285	183	441
8.	Kubutambahan	313	184	497	288	177	465	322	218	540	316	194	510	316	194	510
9.	Tejakula	249	168	417	221	180	401	250	151	401	232	164	396	232	396	396
Jumlah		3.012	2.034	5.046	2.784	2.125	4.909	2.747	2.029	4.776	2.782	1.874	4.656	2.783	1.874	4.657

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.4 Tuna Susila

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remangremang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.



Tabel 4.5.
Jumlah Tuna Susila di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gerokgak	-	3	3	-	4	4	-	6	6	-	5	5	-	4	4
2	Seririt	-	5	5	-	6	6	-	4	4	-	6	6	-	5	5
3	Busungbiu	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-	1	1
4	Banjar	-	2	2	-	3	3	-	2	2	-	3	3	-	2	2
5	Sukasada	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	2	2	-	1	1
6	Buleleng	-	8	8	-	6	6	-	7	7	-	8	8	-	6	6
7	Sawan	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	3	-	3	3
8	Kubutambahan	-	2	2	-	3	3	-	4	4	-	5	5	-	4	4
9	Tejakula	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Jumlah		-	20	20	-	27	27	-	29	29	-	35	35	-	26	26

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.5 Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Tabel 4.6.
Jumlah Gelandangan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gerokgak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Seririt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Busungbiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4	Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sukasada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Buleleng	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	-	3	5	8
7	Sawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
8	Kubutambahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tejakula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	-	7	6	13

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.6 Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- Berpakaian kumuh dan compang camping;
- Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Tabel 4.7.
Jumlah Pengemis di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gerokgak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Seririt	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1
3	Busungbiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5	Sukasada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Buleleng	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
7	Sawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kubutambahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tejakula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	2	2	1	-	1	1	-	1	-	3	3	-	3	3

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



4.3.7 Korban Bencana Alam

Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriterianya adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban terluka atau meninggal;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Dampak psikologis; dan
- d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Tabel 4.8.
Jumlah Korban Bencana Alam di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gerokgak	312	49	1	268	18
2.	Seririt	488	118	528	125	539
3.	Busungbiu	16	16	2	1	9
4.	Banjar	199	87	23	1	77
5.	Sukasada	19	43	15	228	331
6.	Buleleng	283	1	477	1	398
7.	Sawan	175	74	51	13	86
8.	Kubutambahan	438	9	74	-	453
9.	Tejakula	446	1	1	-	199
Jumlah		2.376	398	1.172	637	2.110

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



4.3.8 Fakir Miskin

Penyandang Masalah Sosial Lainnya yaitu Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tabel 4.9.
Jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gerokgak	2.658	235	2.893	6.742	444	7.186	3.469	322	3.791	3.469	322	3.791	2.864	3.434	6298
2	Seririt	824	88	912	4.294	993	5.287	1.712	113	1.825	1.712	113	1.825	1.875	2.293	4168
3	Busungbiu	1.012	25	1.037	3.399	279	3.678	1.167	47	1.214	1.167	47	1.214	4.671	1.276	3395
4	Banjar	70	7	77	7.679	705	8.384	1.208	53	1.261	1.208	53	1.261	3.486	2.290	5776
5	Sukasada	452	16	468	3.285	132	3.417	1.928	88	2.016	1.928	88	2.016	2.301	837	3138
6	Buleleng	1.483	155	1.638	4.793	466	5.259	2.987	291	3.278	2.987	291	3.278	948	2.282	3230
7	Sawan	69	4	73	4.970	229	5.199	847	196	1.043	847	196	1.043	1.307	3.980	5287
8	Kubutambahan	638	17	655	4.685	213	4.898	1.301	60	1.361	1.301	60	1.361	2.235	807	3042
9	Tejakula	328	10	338	5.675	248	5.923	280	23	303	280	23	303	2.700	978	3678
	Jumlah	7.534	557	8.091	45.522	3.709	49.231	14.899	1.193	16.092	14.899	1.193	16.092	22.387	15.625	38.012

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.4 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penanganan PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 4.10.

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kab. Buleleng Tahun 2017

No	Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	2
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	172
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	99
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga	19
5	Karang Taruna (KT)	KT	146
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Lembaga	1
7	Keluarga Pionir	KK	0
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	Lembaga	33
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	7
10	Penyuluh Sosial	Orang	10
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	9
12	Dunia Usaha	Pengusaha	36

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.4.1 Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial



untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

4.4.2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

4.4.3 Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana:

- a. Generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- c. Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
- d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



4.4.4 Lembaga Kesejahteraan Sosial Selanjutnya Disebut LKS

Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4.4.5 Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. Keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

4.4.6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan



pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi Sosial;
- b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. Didirikan secara formal; dan
- d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

4.4.7 Keluarga Pioner

Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
- b. Keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan;
- c. Keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan
- d. Keluarga yang mampu dan mau menularkan prilaku positif kepada keluarga lainnya.

4.4.8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/ RW/ Kampung/ Desa/ kelurahan/ nagari/ banjar atau wilayah adat;
- b. Jaringan sosial yang berada di RT/ RW/ Kampung/ Desa/ Kelurahan/ nagari/ banjar atau wilayah adat; dan



- c. Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.

4.4.9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. Berpendidikan minimal SLTP;
- c. Wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
- d. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. Memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

4.4.10 Penyuluh Sosial

Penyuluh Sosial ada Penyuluh Sosial Fungsional dan Penyuluh Sosial Masyarakat. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Berijazah sarjana (S1)/Diploma IV;
- b) Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
- c) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
- d) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
- e) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan



- f) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;
- b) Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- c) Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
- d) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- e) Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- f) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- g) Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- h) Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- i) Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- j) Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- k) Memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
- l) Paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- m) Memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

4.4.11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Yang Selanjutnya Disebut TKSK

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;



- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

4.4.12 Dunia Usaha

Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. Membantu penanganan masalah sosial.



5.1 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Sosial, mempunyai Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir miskin, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial

5.1.1 Program Dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan fakir miskin, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dalam bentuk bansos
 - c. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan melakukan Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 - b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial dengan melakukan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan social
- b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan

5.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin direalisasikan dalam bentuk Bansos (uang/barang) dan Rehabilitasi sosial Bedah Rumah akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

NO	KECAMATAN / JENIS BANTUAN	TAHUN					JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GEROKGAK						
1	BEDAH RUMAH (APBD I)	100	80	98	110	-	388
2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	5	-	2	-	7
3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	-	9	-	362	-	371
4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	-	30	-	-	30
6	BANTUAN KUBE (APBD I)	1	3	20	-	-	24
7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	-	-	2	2
8	CSR	34	12	77	1	-	124
2	SERIRIT						
1	BEDAH RUMAH (APBD I)	122	90	70	110	5	397
2	REHAB RUMAH (APBD II)	13	15	-	2	-	30
3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	100	221	-	-	-	321
4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	1	-	25	-	26
6	BANTUAN KUBE (APBD I)	-	2	-	-	-	2
7	BANTUAN KUBE (APBD II) + DEKON	-	-	-	-	7	7
8	CSR	6	-	38	8	-	52
3	BUSUNGBIU						
1	BEDAH RUMAH (APBD I)	56	90	51	80	20	297
2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	15	-	4	-	19
3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	71	-	15	-	-	86
4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	35	-	-	-	35
5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	20	-	-	-	20

	6	BANTUAN KUBE (APBD I) + DEKON	-	-	1	-	22	23
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	1	5	-	6
	8	CSR	-	-	-	-	-	-
4	BANJAR							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	45	70	77	30	15	237
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	4	2	-	5	-	11
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	20	11	33	-	-	64
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	-	-	-	-	-
	6	BANTUAN KUBE (APBD I) + DEKON	15	-	-	-	-	15
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	-	-	4	4
	8	CSR	-	7	1	8	-	16
5	SUKASADA							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	67	50	41	52	10	220
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	6	9	2	6	-	23
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	284	317	-	-	-	601
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	5	27	-	-	-	32
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	5	-	3	-	-	8
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	3	5	2	10
	8	CSR	-	9	2	5	-	16
6	BULELENG							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	22	20	23	20	-	85
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	5	18	2	-	-	25
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	250	289	134	-	-	673
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	75	28	-	-	103
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	15	3	21	30	-	69
	6	BANTUAN KUBE (APBD I) + DEKON	15	3	21	-	52	91
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	-	-	17	17
	8	CSR	-	-	-	1	-	1
7	SAWAN							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	67	50	67	41	-	225
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	18	7	2	4	-	31
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	-	-	96	-	-	96
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	5	-	-	-	5
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	25	1	21	-	-	47
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	18	1	3	-	-	22
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	3	-	1	4
	8	CSR	-	1	-	-	-	1

8	KUBUTAMBAHAN						
1	BEDAH RUMAH (APBD I)	55	40	42	19	-	156
2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	-	-	4	-	4
3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	-	-	239	-	-	239
4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	12	-	-	12
5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	-	42	-	-	42
6	BANTUAN KUBE (APBD I)	-	-	15	-	-	15
7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	-	-	-	-
8	CSR	-	-	3	10	-	13
9	TEJAKULA						
1	BEDAH RUMAH (APBD I)	24	40	24	10	5	103
2	REHAB RUMAH (APBD II)	2	7	-	2	-	11
3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	200	-	203	245	-	648
4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
5	BANTUAN KUBE (APBN)	5	22	-	-	-	27
6	BANTUAN KUBE (APBD I)	5	13	-	-	-	18
7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	-	-	-	-
8	CSR	31	2	-	-	-	33
KABUPATEN BULELENG							
1	BEDAH RUMAH (APBD I)	558	530	493	472	55	2.108
2	REHAB RUMAH (APBD II)	48	78	6	29	-	161
3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	925	847	720	607	-	3.099
4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	115	40	-	-	155
5	BANTUAN KUBE (APBN)	57	82	105	55	-	299
6	BANTUAN KUBE (APBD I)	26	9	9	-	-	44
7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	-	10	-	10
8	CSR	71	31	121	33	-	256

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.2.
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Buleleng Tahun 2017

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	2	3
1	Sembako	2.110 Paket
2	Pelatihan Keterampilan UEP	20 Orang
3	Kube APBD II	20 Orang

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pada tahun 2017 bantuan berasal dari APBD II dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PRSE sebanyak 20 Orang diberikan kepada Desa Pangkungparuk dan Desa Musi dengan membentuk satu kelompok per desa yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang.

Tabel 5.3.
Data Jumlah Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	GEROKGAK	18	8	26	18	8	26	17	8	25	17	8	25	17	8	25
2	SERIRIT	53	9	62	52	9	61	52	9	61	52	9	61	51	9	61
3	BUSUNGBIU	43	2	45	43	2	45	43	1	44	42	1	43	42	1	43
4	BANJAR	17	4	21	17	4	21	17	4	21	17	4	21	17	4	21
5	SUKASADA	29	3	32	29	3	32	29	3	32	28	3	31	26	3	31
6	BULELENG	13	7	20	13	7	20	13	7	20	13	7	20	13	7	20
7	SAWAN	19	1	20	19	1	20	19	1	20	19	1	20	19	1	20
8	KUBUTAMBAHAN	7	-	7	7	-	7	7	-	7	7	-	7	7	-	7
9	TEJAKULA	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Jumlah		202	34	236	201	34	235	200	33	233	198	33	231	195	33	228

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Jumlah Veteran pejuang kemerdekaan di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2017 jumlah Veteran pejuang

kemerdekaan laki-laki sebanyak 195 orang dan 33 orang perempuan, totalnya sebanyak 228 orang pejuang kemerdekaan.

Tabel 5.4.

Jumlah Penerima Bantuan Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Bantuan	Tahun															
		2013			2014			2015			2016			2017			
		L	P	JML													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	SEMBAKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	1	50	49	1	50
2	BINGKISAN HUT RI	47	3	50	49	1	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	
3	BANTUAN BEDAH RUMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	10	-	-	-	
4	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	47	3	50	49	1	50	50	-	50	58	2	60	49	1	50	

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pada tahun 2017 Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kabupaten Buleleng yang mendapatkan bantuan permakanaan berupa sembako sebanyak 49 Veteran laki-laki dan 1 orang Veteran perempuan dengan total keseluruhan 50 Veteran.

5.2 BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

5.2.1 Program Dan Kegiatan Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2017

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

- b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
 - d. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti
2. Program pembinaan anak terlantar.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
- a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
 - b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
- a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
 - b. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

5.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.5.

Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Terlantar di Kab. Buleleng Th. 2013 - 2017

No	Jenis Bantuan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SEMPAKO	-	-	-	-	-	-	305	495	800	370	410	780	370	315	685
2	SERAGAM	95	105	200	120	80	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	SEKOLAH															
3	BANTUAN UEP	13	7	20	3	7	10	10	10	20	6	14	20	5	15	20
4	PENDAMPINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PKSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	327	589	-	-	-
6	PELATIHAN KETERAMPILAN UEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		108	112	220	123	87	210	315	505	820	638	751	1.389	375	330	705

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.6.

Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Bantuan	Tahun															
		2013			2014			2015			2016			2017			
		L	P	JML	L	P	JML										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	PELATIHAN KETERAMPILAN DAN BANTUAN UEP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
2	PENDAMPINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SEMPAKO TRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	-	-	-	
4	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	2	7	9	10	-	10									

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.7.

Jumlah Penerima Bantuan Untuk Lanjut Usia Terlantar di Kab. Buleleng Th. 2013 - 2017

No	Jenis Bantuan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SEMPAKO	60	80	140	255	245	500	300	500	800	150	300	450	440	460	900
2	BANTUAN UEP	7	13	20	3	17	20	10	10	20	9	11	20	-	20	20
3	RUJUKAN KE PANTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BANTUAN BEDAH KAMAR LANSIA	-	-	-	5	10	15	-	-	-	7	9	16	-	-	-
5	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		67	93	160	263	272	535	310	510	820	166	320	486	440	480	920

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.8.
Data Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017 (APBN)

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Tahun 2017		
		L	P	Total
1	2	3	4	5
1	GEROKGAK	10	16	26
2	SERIRIT	10	10	20
3	BUSUNGBIU	4	5	9
4	BANJAR	-	-	-
5	SUKASADA	3	5	8
6	BULELENG	7	7	14
7	SAWAN	4	10	14
8	KUBUTAMBAHAN	2	7	9
9	TEJAKULA	-	-	-
Jumlah		40	60	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.9.
Data Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017 (APBD)

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Tahun 2017		
		L	P	TOTAL
1	2	3	4	5
1	GEROKGAK	11	20	31
2	SERIRIT	17	16	33
3	BUSUNGBIU	-	-	-
4	BANJAR	-	3	3
5	SUKASADA	-	-	-
6	BULELENG	3	6	9
7	SAWAN	4	7	11
8	KUBUTAMBAHAN	5	5	10
9	TEJAKULA	-	-	-
Jumlah		40	57	97

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Tabel 5.10.
Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kedisabilitasannya
Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Kecacatan / Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CACAT TUBUH	1.845	1.511	3.356	1.796	1.488	3.284	1.750	1.467	3.217	1.711	1.433	3.144	1.711	1.433	3.144
1	GEROKGAK	265	239	504	262	237	499	258	236	494	253	233	486	253	233	486
2	SERIRIT	218	198	416	212	198	410	208	198	406	203	194	397	203	194	397
3	BUSUNGBIU	125	78	203	116	72	188	111	67	178	105	66	171	105	66	171
4	BANJAR	172	145	317	165	143	308	159	140	299	153	136	289	153	136	289
5	SUKASADA	275	162	437	271	160	431	266	157	423	261	155	416	261	155	416
6	BULELENG	279	269	548	279	266	545	271	262	533	273	254	527	273	254	527
7	SAWAN	175	130	305	170	128	298	165	126	291	161	121	282	161	121	282
8	KUBUTAMBAHAN	186	163	349	175	160	335	171	160	331	165	157	322	165	157	322
9	TEJAKULA	150	127	277	146	124	270	141	121	262	137	117	254	137	117	254
2	CACAT NETRA	320	176	496	295	153	448	255	126	381	209	137	346	209	137	346
1	GEROKGAK	50	42	92	45	35	80	40	20	60	25	29	54	25	29	54
2	SERIRIT	35	25	60	35	20	55	35	15	50	30	19	49	30	19	49
3	BUSUNGBIU	45	20	65	45	15	60	27	18	45	25	15	40	25	15	40
4	BANJAR	35	15	50	30	15	45	26	14	40	20	16	36	20	16	36
5	SUKASADA	45	10	55	30	18	48	35	11	46	32	10	42	32	10	42
6	BULELENG	30	21	51	36	10	46	30	13	43	20	17	37	20	17	37
7	SAWAN	25	13	38	20	15	35	20	10	30	19	8	27	19	8	27
8	KUBUTAMBAHAN	30	10	40	29	10	39	22	10	32	18	11	29	18	11	29
9	TEJAKULA	25	20	45	25	15	40	20	15	35	20	12	32	20	12	32
3	TUNA RUNGU	170	67	237	145	63	208	123	50	173	102	43	145	102	43	145
1	GEROKGAK	20	12	32	20	5	25	15	5	20	15	4	19	15	4	19
2	SERIRIT	25	10	35	15	15	30	15	10	25	12	8	20	12	8	20
3	BUSUNGBIU	20	10	30	16	10	26	19	4	23	15	5	20	15	5	20
4	BANJAR	19	10	29	20	5	25	15	5	20	10	8	18	10	8	18
5	SUKASADA	15	6	21	15	5	20	10	7	17	12	3	15	12	3	15
6	BULELENG	17	3	20	10	8	18	13	2	15	8	2	10	8	2	10
7	SAWAN	15	8	23	17	4	21	12	6	18	10	4	14	10	4	14
8	KUBUTAMBAHAN	20	5	25	20	3	23	15	5	20	9	7	16	9	7	16
9	TEJAKULA	19	3	22	12	8	20	9	6	15	11	2	13	11	2	13
4	TUNA WICARA	183	73	256	168	66	234	154	61	215	132	64	196	132	64	196
1	GEROKGAK	25	15	40	20	15	35	20	12	32	20	11	31	20	11	31
2	SERIRIT	30	5	35	22	10	32	25	5	30	17	10	27	17	10	27
3	BUSUNGBIU	20	10	30	20	5	25	10	10	20	10	8	18	10	8	18
4	BANJAR	21	6	27	19	7	26	18	6	24	18	4	22	18	4	22
5	SUKASADA	20	13	33	22	10	32	20	10	30	20	5	25	20	5	25
6	BULELENG	19	6	25	19	3	22	15	5	20	11	8	19	11	8	19
7	SAWAN	16	5	21	14	6	20	13	6	19	13	5	18	13	5	18
8	KUBUTAMBAHAN	17	8	25	15	8	23	17	4	21	12	8	20	12	8	20
9	TEJAKULA	15	5	20	17	2	19	16	3	19	11	5	16	11	5	16
5	EKS PENYAKIT KRONIS	120	55	175	120	44	164	110	40	150	101	39	140	101	39	140
1	GEROKGAK	19	4	23	18	3	21	16	4	20	12	7	19	12	7	19
2	SERIRIT	10	10	20	13	6	19	12	6	18	10	6	16	10	6	16
3	BUSUNGBIU	12	6	18	12	4	16	8	6	14	11	2	13	11	2	13

	4	BANJAR	13	8	21	15	5	20	15	3	18	12	5	17	12	5	17
	5	SUKASADA	11	6	17	10	6	16	11	4	15	13	1	14	13	1	14
	6	BULELENG	19	5	24	19	4	23	17	5	22	14	7	21	14	7	21
	7	SAWAN	10	4	14	7	6	13	8	3	11	9	1	10	9	1	10
	8	KUBUTAMBAHAN	11	6	17	10	6	16	12	2	14	9	4	13	9	4	13
	9	TEJAKULA	15	6	21	16	4	20	11	7	18	11	6	17	11	6	17
6		CACAT MENTAL	279	117	396	274	104	378	255	106	361	240	102	342	240	102	342
	1	GEROKGAK	41	19	60	38	17	55	34	16	50	30	15	45	30	15	45
	2	SERIRIT	30	16	46	36	8	44	30	13	43	35	7	42	35	7	42
	3	BUSUNGBIU	23	20	43	30	12	42	30	10	40	29	10	39	29	10	39
	4	BANJAR	45	7	52	35	16	51	35	15	50	30	17	47	30	17	47
	5	SUKASADA	28	10	38	30	6	36	30	5	35	24	10	34	24	10	34
	6	BULELENG	35	19	54	43	10	53	32	20	52	29	20	49	29	20	49
	7	SAWAN	22	10	32	18	12	30	20	9	29	20	7	27	20	7	27
	8	KUBUTAMBAHAN	30	6	36	24	10	34	23	10	33	22	10	32	22	10	32
	9	TEJAKULA	25	10	35	20	13	33	21	8	29	21	6	27	21	6	27
7		EKS PSIKOTIK	134	42	176	122	34	156	94	42	136	90	31	121	90	31	121
	1	GEROKGAK	17	5	22	18	3	21	16	4	20	11	8	19	11	8	19
	2	SERIRIT	21	4	25	19	4	23	15	6	21	16	2	18	16	2	18
	3	BUSUNGBIU	19	3	22	10	10	20	12	7	19	13	4	17	13	4	17
	4	BANJAR	14	4	18	12	4	16	10	5	15	12	2	14	12	2	14
	5	SUKASADA	11	3	14	11	1	12	8	2	10	5	4	9	5	4	9
	6	BULELENG	16	5	21	15	5	20	10	2	12	13	3	16	13	3	16
	7	SAWAN	15	3	18	12	2	14	8	6	14	7	5	12	7	5	12
	8	KUBUTAMBAHAN	10	10	20	15	3	18	9	6	15	8	2	10	8	2	10
	9	TEJAKULA	11	5	16	10	2	12	6	4	10	5	1	6	5	1	6
8		CACAT GANDA	247	221	468	263	214	477	269	179	448	256	163	419	256	163	419
	1	GEROKGAK	36	35	71	47	35	82	42	33	75	39	30	69	39	30	69
	2	SERIRIT	20	28	48	29	27	56	36	25	61	35	22	57	35	22	57
	3	BUSUNGBIU	19	18	37	23	16	39	24	17	41	24	15	39	24	15	39
	4	BANJAR	22	27	49	28	14	42	25	14	39	23	17	40	23	17	40
	5	SUKASADA	27	20	47	27	18	45	25	17	42	29	14	43	29	14	43
	6	BULELENG	40	29	69	36	32	68	33	26	59	35	17	52	35	17	52
	7	SAWAN	33	18	51	28	21	49	27	14	41	27	14	41	27	14	41
	8	KUBUTAMBAHAN	29	28	57	31	24	55	31	21	52	25	18	43	25	18	43
	9	TEJAKULA	21	18	39	14	27	41	26	12	38	19	16	35	19	16	35

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.11.

Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) di Kab. Buleleng
Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun											
		2013			2014			2015			2016		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BANTUAN ALAT BANTU	49	34	83	54	21	75	51	31	82	63	36	99
2	SEMBAKO	19	21	40	29	14	43	12	13	25	120	82	202
3	BANTUAN ASODK-B	39	41	80	37	44	81	41	49	90	42	27	69
4	RUJUKAN	-	-	-	-	-	-	4	2	6	2	1	3
5	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		107	96	203	120	79	199	108	95	203	227	146	373

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.12.

Jumlah Penerima Bantuan dan Pelayanan Untuk Penyandang Disabilitas
di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SEMBAKO	95	65	160	185	85	270	210	140	350	410	370	780	160	140	300
2	BANTUAN UEP	97	68	165	95	40	135	85	65	150	61	51	112	20	10	30
3	RUJUKAN KE PANTI	-	2	2	2	1	3	1	-	1	2	-	2	-	-	-
4	PELATIHAN KETERAMPILAN PIJAT	9	6	15	-	-	-	10	5	15	8	7	15	-	-	-
5	PELATIHAN KETERAMPILAN VOKASIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		201	141	342	282	126	408	306	210	516	481	428	909	180	150	330

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.13.

Data Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Alat Bantu Th. 2013-2017

NO	KECAMATAN / NAMA BANTUAN ALAT BANTU	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	GEROKGAK					
	1 KURSI RODA	8	9	6	16	23
	2 TONGKAT KETIAK	5	6	2	6	5
	3 TONGKAT PUTIH	2	1	-	1	-
	4 PROTHESA	2	1	-	-	-
	5 BRACE	-	2	-	-	-
	6 ALAT BANTU DENGAR	-	5	1	2	-
	7 DLL	-	-	-	-	1
2	SERIRIT					
	1 KURSI RODA	6	5	8	11	24
	2 TONGKAT KETIAK	2	2	7	8	1
	3 TONGKAT PUTIH	-	-	-	-	-
	4 PROTHESA	-	4	1	-	-
	5 BRACE	-	-	2	2	-
	6 ALAT BANTU DENGAR	2	1	2	3	-
	7 DLL	-	-	-	-	-
3	BUSUNGBIU					
	1 KURSI RODA	4	3	4	8	4
	2 TONGKAT KETIAK	1	-	3	5	-
	3 TONGKAT PUTIH	-	1	-	-	-
	4 PROTHESA	-	1	1	1	-
	5 BRACE	1	1	-	2	-
	6 ALAT BANTU DENGAR	1	4	2	2	-
	7 DLL	-	-	-	-	-
4	BANJAR					
	1 KURSI RODA	8	21	12	17	10
	2 TONGKAT KETIAK	1	6	8	8	3
	3 TONGKAT PUTIH	-	3	2	1	-
	4 PROTHESA	-	1	-	-	-
	5 BRACE	2	-	-	-	-
	6 ALAT BANTU DENGAR	-	-	-	2	5
	7 DLL	-	-	-	-	-
5	SUKASADA					
	1 KURSI RODA	4	8	11	8	21
	2 TONGKAT KETIAK	-	1	2	4	1
	3 TONGKAT PUTIH	-	2	-	-	-

	4	PROTHESA	-	-	2	-	-
	5	BRACE	-	1	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	3	2	2	1	-
	7	DLL	-	-	-	-	-
6	BULELENG						
	1	KURSI RODA	7	6	15	16	38
	2	TONGKAT KETIAK	-	2	4	4	1
	3	TONGKAT PUTIH	-	2	1	1	-
	4	PROTHESA	1	-	1	2	-
	5	BRACE	1	2	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	2	3	4	3	2
	7	DLL	-	-	-	-	-
7	SAWAN						
	1	KURSI RODA	5	6	9	12	7
	2	TONGKAT KETIAK	2	3	2	4	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	1	-	-	-
	4	PROTHESA	1	-	2	1	-
	5	BRACE	-	-	1	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	2	2	2	1	-
	7	DLL	-	-	-	-	-
8	KUBUTAMBAHAN						
	1	KURSI RODA	4	7	10	11	7
	2	TONGKAT KETIAK	1	3	3	2	4
	3	TONGKAT PUTIH	1	-	-	1	-
	4	PROTHESA	-	-	-	-	-
	5	BRACE	1	2	-	2	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	2	2	4	2	3
	7	DLL	-	-	-	-	-
9	TEJAKULA						
	1	KURSI RODA	12	6	14	15	11
	2	TONGKAT KETIAK	2	2	2	5	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	2	-	1	-
	4	PROTHESA	-	-	3	4	-
	5	BRACE	2	1	2	8	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	1	2	-	1	-
	7	DLL	-	-	-	-	-
JUMLAH							
	1	KURSI RODA	58	71	89	114	145
	2	TONGKAT KETIAK	14	25	33	46	15
	3	TONGKAT PUTIH	3	12	3	5	-
	4	PROTHESA	4	7	10	8	-



	5	BRACE	7	9	5	14	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	13	21	17	17	10
	7	DLL	-	-	-	-	1

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.14.
Data Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penerima		
		ASPD Berat (APBN)	ASPD Berat (APBD)	Total
1	2	3	4	5
1	GEROKGAK	36	11	47
2	SERIRIT	41	6	47
3	BUSUNGBIU	19	11	30
4	BANJAR	34	4	38
5	SUKASADA	19	5	24
6	BULELENG	45	16	61
7	SAWAN	36	6	42
8	KUBUTAMBAHAN	27	7	34
9	TEJAKULA	11	10	21
Jumlah		268	76	344

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.15.
Jumlah Gelandangan Yang Dipulangkan Ke Daerah Asal Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PEDAHAN	3	2	5	3	6	9	2	3	5	4	9	13	-	-	-
2	MUNTI	5	4	9	5	7	12	3	4	7	2	4	6	-	-	-
3	KAMPUNG BARU	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-
4	BANJAR JAWA	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
5	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	16
Jumlah		8	6	14	8	13	21	8	9	17	6	13	19	15	1	16

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.16.

Jumlah Pengemis Yang Di Razia Tim Yustisi Dan Dipulangkan Ke Daerah Asal Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PEDAHAN	3	2	5	3	6	9	2	3	5	4	9	13	-	-	-
2	MUNTI	5	4	9	5	7	12	3	4	7	2	6	8	-	-	-
3	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	40
Jumlah		8	6	14	8	13	21	5	7	12	6	15	21	4	36	40

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

5.3 BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.3.1 Program Dan Kegiatan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tahun 2017

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
 - b. Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

5.3.2 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2017

Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.17.
Data Kelengkapan Sarana Penanggulangan Bencana Dinas Sosial Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	GUDANG BENCANA	-	1	-	-	-
2	MOBIL RESCUE	1	-	-	-	-
3	MOBIL DUMLAP	-	1	-	-	-
4	SPD MTR TRAIL	-	-	-	1	-
5	PERAHU	6	-	-	-	-
6	TRUK RESCUE	-	-	-	-	-
7	PLAMPUNG	24	-	-	-	-
8	KAMPUNG SIAGA BENCANA	-	1	1	-	1
9	DLL	-	-	-	-	-
Jumlah		31	3	1	1	1

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.18.
Data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Buleleng Tahun 2016

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA											
		BENCANA ALAM								BENCANA SOSIAL			
		BANJIR	LONGSOR	ANGIN PUTING BELIUNG	GEMPA BUMI	AIR LAUT PASANG	KEBAKARAN	SUNAMI	DLL	BENTROK ANTAR BANJAR	BENTROK ANTAR DESA/KEL.	TAWURAN REMAJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	GEROKGAK												
1	Desa Tukadsumaga	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Desa Celukanbawang	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
3	Desa Tinga Tinga	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
4	Desa Pengulon	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
5	Desa Patas	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
6	Desa Gerokgak	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
7	Desa Sanggalangit	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
8	Desa Musi	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
9	Desa Penyabangan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
10	Desa Banyupoh	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-

	11	Desa Pemuteran	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Pejarakan	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-
	13	Desa Sumberkima	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Sumberklampok	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-
2	SERIRIT												
	1	Desa Kalianget	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Joanyar	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Tangguwisia	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Sulanyah	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	5	Kel. Seririt	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-
	6	Desa Pengastulan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Patemon	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-
	8	Desa Lokapaksa	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Umeanyar	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Banjarasem	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Kalisada	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Pangkungparuk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Ularan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Unggahan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Bubunan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Desa Ringdikit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	Desa Rangdu	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	Desa Mayong	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	Desa Bestala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	Desa Munduk Bestala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	Desa Gunung Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BUSUNGBIU												
	1	Desa Busungbiu	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Kedis	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Subuk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Tinggar Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Titab	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Telaga	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Sepang Kelod	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Sepang	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Bongan Cina	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Tista	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Puncak Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Kekeran	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Bengkel	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Pelapuan	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Umejero	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BANJAR												
	1	Desa Kaliasem	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Temukus	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Tigawasa	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Tampekan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Dencarik	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Banjar Tegeha	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Banjar	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Pedawa	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Banyuseri	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Tirtasari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Kayuputih	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Banyuatis	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Gesing	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Munduk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Cempaga	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Desa Sidatapa	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUKASADA												
	1	Kel. Sukasada	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Padangbulia	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	3	Desa Pegayaman	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Gitgit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Wanagiri	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Pancasari	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Silangjana	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Pegadungan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Sambangan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Panji	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Panji Anom	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Tegallingah	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Selat	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Kayuputih	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Ambengan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BULELENG												
	1	Desa Petandakan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Jinangdalem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Poh Bergong	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Alasanger	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Penglitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Kel. Penarukan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	7	Kel. Banyuning	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	8	Kel. Astina	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Kel. Kendran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Kel. Kampung Singaraja	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Kel. Liligundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Kel. Paket Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Kel. Banjar Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Kel. Banjar Bali	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Kel. Kampung Kajianan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Kel. Kampung Bugis	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	17	Kel. Kampung Baru	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	18	Kel. Kampung Anyar	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	19	Kel. Kaliuntu	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	Kel. Banjar Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	Kel. Beratan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	Kel. Banyuasri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	Desa Bakti Seraga	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	Desa Pamaran	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
	25	Desa Tukad Mungga	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	26	Desa Anturan	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	27	Desa Kalibukbuk	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	28	Desa Sari Mekar	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	Desa Nagasepaha	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAWAN												
	1	Desa Bungkulun	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Jagaraga	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Menyali	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Sawan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Bebetin	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Sekumpul	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Galungan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Sudaji	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Suwug	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Sinabun	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Kerobokan	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Sangsit	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Giri Emas	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
8	KUBUTAMBAHAN												
	1	Desa Kubutambahan	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Bengkala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Bila	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Tamblang	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	5	Desa Bonthing	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Pakisan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Tajun	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Mangening	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Depeha	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Bulian	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Tambakan	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Bukti	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-
9	TEJAKULA											
	1	Desa Pacung	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
	2	Desa Julah	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
	3	Desa Sembiran	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Les	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Bondalem	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
	6	Desa Tejakula	√	√	-	√	√	-	-	-	-	-
	7	Desa Madenan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Penuktukan	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
	9	Desa Sambirenteng	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
	10	Desa Tembok	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.19.
Data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Buleleng Tahun 2017

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA											
		BENCANA ALAM								BENCANA SOSIAL			
		BANJIR	LONGSOR	ANGIN PUTING BELIUNG	GEMPA BUMI	AIR LAUT PASANG	KEBAKARAN	SUNAMI	DLL	BENTROK ANTAR BANJAR	BENTROK ANTAR DESA/KEL.	TAWURAN REMAJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	GEROKGAK												
	1	Desa Tukadsumaga	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Celukanbawang	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Tinga Tinga	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Pengulon	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Patas	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Gerokgak	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Sanggalangit	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Musi	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Penyabangan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Banyupoh	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Pemuteran	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Pejarakan	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-
	13	Desa Sumberkima	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Sumberklampok	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-
2	SERIRIT												
	1	Desa Kalianget	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Joanyar	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Tangguwisia	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Sulanyah	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	5	Kel. Seririt	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-
	6	Desa Pengastulan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Patemon	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-
	8	Desa Lokapaksa	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Umeanyar	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Banjarasem	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Kalisada	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Pangkungparuk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	Desa Ularan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Unggahan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Bubunan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Desa Ringdikit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	Desa Rangdu	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	Desa Mayong	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	Desa Bestala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	Desa Munduk Bestala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	Desa Gunung Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BUSUNGBIU												
	1	Desa Busungbiu	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Kedis	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Subuk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Tinggar Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Titab	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Telaga	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Sepang Kelod	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Sepang	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Bongan Cina	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Tista	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Puncak Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Kekeran	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Bengkel	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Pelapuan	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Umejero	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BANJAR												
	1	Desa Kaliasem	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Temukus	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Tigawasa	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Tampekan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Dencarik	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Banjar Tegeha	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Banjar	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Pedawa	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Banyuseri	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Tirtasari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Kayuputih	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Banyuatis	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Gesing	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Munduk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Cempaga	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Desa Sidatapa	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUKASADA												
	1	Kel. Sukasada	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Padangbulia	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Pegayaman	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Gitgit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Wanagiri	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Pancasari	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Silangjana	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Pegadungan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Sambangan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Panji	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Panji Anom	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Tegallinggah	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Selat	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Kayuputih	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Ambengan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BULELENG												
	1	Desa Petandakan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Jinangdalem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Poh Bergong	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4	Desa Alasangker	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Desa Penglatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kel. Penarukan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
7	Kel. Banyuning	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
8	Kel. Astina	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kel. Kendran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kel. Kampung Singaraja	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kel. Liligundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kel. Paket Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kel. Banjar Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kel. Banjar Bali	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kel. Kampung Kajianan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kel. Kampung Bugis	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
17	Kel. Kampung Baru	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
18	Kel. Kampung Anyar	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
19	Kel. Kaliuntu	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kel. Banjar Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kel. Beratan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kel. Banyuasri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Desa Bakti Seraga	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Desa Pemaron	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
25	Desa Tukad Mungga	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
26	Desa Anturan	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
27	Desa Kalibukbuk	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
28	Desa Sari Mekar	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Desa Nagasepaha	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAWAN												
1	Desa Bungkulan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
2	Desa Jagaraga	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Desa Menyali	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Desa Sawan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Desa Bebetin	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Desa Sekumpul	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Desa Galungan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Desa Sudaji	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Desa Suwug	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Desa Sinabun	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Desa Kerobokan	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
12	Desa Sangsit	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
13	Desa Giri Emas	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
8	KUBUTAMBAHAN												
1	Desa Kubutambahan	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
2	Desa Bengkala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Desa Bila	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Desa Tamblang	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Desa Bonthing	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Desa Pakisan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Desa Tajun	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Desa Mangening	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Desa Depeha	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Desa Bulian	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Desa Tambakan	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desa Bukti	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
9	TEJAKULA												
1	Desa Pacung	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
2	Desa Julah	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
3	Desa Sembiran	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Desa Les	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Desa Bondalem	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
6	Desa Tejakula	√	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
7	Desa Madenan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Desa Penuktukan	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-



9	Desa Sambirenteng	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
10	Desa Tembok	√		-	-	√	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.20.
Jumlah Korban Bencana Alam yang Memperoleh Bantuan Sosial
Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN					JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEMPAKO (BERAS, KECAP, SARDEN, SAOS, MINYAK GORENG, MIE INSTAN)	2.376 KK	398 KK	1.172 KK	637 KK	2.110 KK	6.693 KK
2	PERALATAN DAPUR	72 KK	129 KK	32 KK	68 KK	-	301 KK
3	BAJU KAOS DEWASA	109 KK	155 KK	462 KK	12 KK	-	738 KK
4	KAIN SARUNG	8 KK	307 KK	144 KK	10 KK	-	469 KK
5	KAIN DASTER	373 KK	396 KK	511 KK	12 KK	-	1.292 KK
6	KAIN BATIK	121 KK	183 KK	413 KK	-	-	717 KK
7	SELIMUT	229 KK	307 KK	70 KK	-	-	606 KK
8	PAKAIAN SERAGAM SD	295 KK	105 KK	127 KK	175 KK	-	702 KK
9	FOOD WARE	33 KK	13 KK	-	-	-	46 KK
10	KID WARE	11 KK	17 KK	6 KK	-	-	34 KK
11	VELTBED	-	-	-	1 KK	-	1 KK
12	TIKAR	85 KK	21 KK	-	-	-	106 KK
13	MATRAS	181 KK	213 KK	441 KK	79 KK	-	914 KK
14	TENDA BIRU (TERPAL)	54 KK	62 KK	43 KK	53 KK	-	212 KK
	JUMLAH	3.947 KK	2.306 KK	3.421 KK	1.047 KK	2.110 KK	12.831 KK

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.21.
Jumlah Korban Bencana Sosial Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN					JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEMPAKO (BERAS, KECAP, SARDEN, SAOS, MINYAK)	-	-	52 KK	-	-	52 KK

	GORENG)						
2	KAIN SARUNG	-	-	12 KK	-	-	12 KK
3	KAIN BATIK	-	-	40 KK	-	-	40 KK
4	DASTER	-	-	30 KK	-	-	30 KK
5	BAJU KAOS DEWASA	-	-	30 KK	-	-	30 KK
6	HANDUK	-	-	30 KK	-	-	30 KK
7	TIKAR	-	-	30 KK	-	-	30 KK
8	MATRAS	-	-	10 KK	-	-	10 KK
9	TENDA BIRU (TERPAL)	-	-	40 KK	-	-	40 KK
10	KESERASIAN SOSIAL	3 Desa	11 Desa	5 Desa	-	-	19 Desa

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.22.
Data Penerima Bantuan Santunan Kematian Masyarakat Miskin (SANTIMAS) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun															Total		
		2013			2014			2015			2016			2017			L	P	JML
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	GEROKGAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERIRIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2
3	BUSUNGBIU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	BANJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUKASADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BULELENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	30	18	12	30
7	SAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KUBUTAMBAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	TEJAKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	4	3	7
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	15	40	25	15	40

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.23.
Data Keluarga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun												
		2013			2014			2015			2016			2017
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	GEROKGAK	1	278	279	2	272	274	2	266	268	30	1.084	1.114	1.095
2	SERIRIT	13	410	423	12	393	405	25	378	403	77	1.821	1.898	1.841

3	BUSUNGBIU	3	233	236	3	224	227	4	216	220	23	908	931	919
4	BANJAR	15	533	548	15	525	540	47	1.376	1.423	75	1.739	1.814	1.765
5	SUKASADA	27	685	712	27	667	694	27	658	685	67	1.392	1.459	1.421
6	BULELENG	14	518	532	8	507	515	3	503	506	57	1.430	1.487	1.450
7	SAWAN	3	247	250	3	234	237	2	232	234	18	854	872	863
8	KUBUTAMBAHAN	2	251	253	2	240	242	2	229	231	29	946	975	943
9	TEJAKULA	14	204	218	14	198	212	14	187	201	38	736	774	754
Jumlah		9	3.359	3.451	8	3.260	3.346	126	4.045	4.17	414	10.910	11.324	11.051
		2			6					1				

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Pada tahun 2016 KPM PKH berjumlah 11.324 KPM sedangkan pada tahun 2017 KPM PKH menjadi 11.051 KPM.

Tabel 5.24.

Data Keluarga Fakir Miskin Kabupaten Buleleng Yang Telah Memperoleh Bantuan KKS dan KIS Tahun 2013 - 2017

NO	KECAMATAN / JENIS BANTUAN		TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2		3	4	5	6	7
1	GEROKGAK						
1	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	7.181	6.356
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	11.566	15.741
2	SERIRIT						
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	5.882	5.600
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	9.809	12.997
3	BUSUNGBIU						
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	2.715	2.267
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	4.576	5.531
4	BANJAR						
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	5.032	4.716
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	9.375	12.475
5	SUKASADA						
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	4.479	3.745
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	9.754	11.798

6	BULELENG						
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	4.493	4.148
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	9.120	12.933
7	SAWAN						
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	3.635	3.173
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	5.631	6.974
8	KUBUTAMBAHAN						
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	5.252	4.590
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	6.997	9.281
9	TEJAKULA						
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)	-	-	-	3.752	2.620
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	5.785	9.604
JUMLAH							
	1	KARTU KELUARGA SEJAHTERA(KKS)	-	-	-	42.421	37.215
	2	KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	-	-	-	72.613	97.334

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

5.4 UPTD MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN

5.4.1 Program Dan Kegiatan UPTD Monumen Dan Tugu Perjuangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan

5.4.2 Realisasi Program dan Kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

Realisasi Program dan Kegiatan pada UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.25.

Data Taman Makam Pahlawan (TMP), Monumen Dan Tugu Perjuangan Yang Diserahkan Dan Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017

NO	NAMA TMP, MONUMEN/TUGU	LUAS AREA	LOKASI / ALAMAT		KONDISI	DIBANGUN TAHUN	KETERANGAN
			DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TAMAN MAKAM PAHLAWAN "CURASTANA" SINGARAJA	6.350 M2	Kel. Banjar Tegal	Buleleng	baik dan terawat	Rehab Tahun 2015	TMP Kab. Buleleng dengan jumlah makam sebanyak 471 Buah
2	MONUMEN "BHUANA KERTA"	12.350 M2	Desa Panji	Sukasada	baik dan terawat	Tahun 1945, 2014	Tonggak sejarah perjuangan rakyat Buleleng melawan penjajah Belanda tahun
3	MONUMEN " PERANG JAGARAGA"	5.550 M2	Desa Jagaraga	Sawan	baik dan terawat	Tahun 2016	Tonggak sejarah perjuangan rakyat Raja Buleleng melawan penjajah Belanda tahun 1849
4	MONUMEN "TRI YUDHA SAKTI"	4.100 M2	Kelurahan Sukasada	Sukasada	baik dan terawat	Tahun Awal 1998, Akhir 2008	Monumen Mengenang jasa Pejuang Kemerdekaan Buleleng melawan Penjajah Belanda yaitu : Kol Mayor Metra, Kapten Japa dan Kapten Muka
5	MONUMEN PERJUANGAN MARKAS " AYODYA PURA"	550 M2	Desa Selat	Sukasada	baik dan belum terawat	05 May 2014	Monumen Markas Perjuangan Rakyat Buleleng melawan Penjajah Belanda yang dipimpin langsung oleh Mayor Metra
6	TUGU PERJUANGAN GITGIT (Monumen Wira Bhuana belum selesai sertifikasi)	-	Desa Gitgit	Sukasada	baik dan belum terawat	10 Agustus 1968	Tonggak sejarah perjuangan rakyat Buleleng melawan penjajah Belanda tanggal 12 Mei 1946

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.26.

Data Monumen Dan Tugu Perjuangan Yang Belum Diserahkan Dan Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017

NO	NAMA TMP, MONUMEN/TUGU	LUAS AREA	LOKASI / ALAMAT		KONDISI	DIBANGUN TAHUN	KETERANGAN
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Monumen Peringatan Perjuangan	-	Desa Kedis	Busungbiu	Rusak Ringan	Diresmikan, 20 Mei 1979	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat
2	Monumen Kusuma Yuda	-	Desa Tinggarsari	Busungbiu	Masih Layak	Diresmikan, 17 Agustus 2009	Diperingati setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun dilaksanakan upacara bendera, pujuwalinya dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus, setiap tahun
3	Monumen Desa Banjarasem	-	Desa Banjarasem	Seririt	Cukup Baik	-	Mengenang perjuangan di Desa Banjarasem
4	Monumen Desa Joanyar	-	Desa Joanyar	Seririt	Cukup Baik	-	Mengenang perjuangan di Desa Joanyar
5	Monumen Tugu Perjuangan	-	Desa Pelapuan	Busungbiu	Belum Sempurna	Diresmikan, 20 Mei 2008	Mengenang sejarah perjuangan dan para pejuang
6	Monumen Tugu Lila Pancha Graha	4 M2	Desa Pakisan	Kubutambahan	Rusak	Diresmikan, Hari Sabtu, 30 Nopember 2002	Mengenang para pejuang yang gugur: Pan Ropen, Pan Ginarsa, I Swarandia, I Santa, I Kandel, I Metre/Meter,

							Pan Teka, I Tinggal
7	Monumen Kusuma Mandala	-	Desa Bubunan	Seririt	Baik	Diresmikan, 01 Oktober 1996	Mengenang sejarah perjuangan Desa Bubunan tanggal 06 April yang gugur: Nengah Sumandra, Wayan Sada, Ketut Suweca
8	Monumen Kusuma Mandala	-	Desa Bestala	Seririt	Baik	Diresmikan, 20 - 05 - 1989	Mengenang sejarah perjuangan: Made Anila, Ketut Mudana, Putu Sedana, Made Cana, Nyoman Sumada
9	Monumen Kusuma Yudha	25 M2	Desa Ringdikit	Seririt	Baik	Diresmikan, 17 Agustus 1995	Mengenang para pejuang yang gugur: J. Willem, Mr. X, I Dewa Made Rai, I Gusti Agung Putra (Maruti), Mukadis, I Gede Rai, Sulandra, Dewa Putu Sumpena, Gede Tantri
10	Monumen Peringatan Perjuangan	-	Desa Busungbiu	Busungbiu	Rusak Berat	Diresmikan, 17 Agustus 1979	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Busungbiu, yang gugur: Wirta, I Ketut



							Sajeng, Nyoman Mandera, Ketut Wita
11	Monumen Wira Bhuana	-	Gitgit	Sukasada	Sedang	-	Pertempuran antara pemuda pejuang dengan serdadu NICA tanggal 12 Mei 1946, 9 orang pemuda pejuang gugur
12	Monumen Tugu Perjuangan Desa Sepang	-	Sepang	Busungbiu	Rusak Berat	-	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat desa sepang
13	Monumen Pura Perjuangan	-	Pelapuan	Busungbiu	Baik	Diresmikan, 17 Agustus 2010	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat desa Pelapuan
14	Monumen Desa Pangkung Paruk	-	Pangkungparuk	Seririt	Cukup Baik	Diresmikan, tahun 1935	Tempat penyingkiran
15	Monumen Pan Janji	9 M2	Tunjung	Busungbiu	Setengah Rusak	Diresmikan, 01 Januari 1993	Mengenang para pejuang yang gugur: Pan Janji dan Moyo
16	Monumen Nyoman Rumada	-	Tamblang	Kubutambahan	Cukup Baik	Diresmikan, 17 Agustus 2014	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Tamblang yang gugur: Nyoman Rumada, Kubayan Siti
17	Monumen Sthana Wira Yudha	9 M2	Depeha	Kubutambahan	Sedikit Rusak	Diresmikan, 19 Maret 2003	Mengenang para pejuang yang gugur: I Gede Ngurah, I

							Wayan Gina
18	Monumen Giri Satrya Yudha Bhakti	-	Bontihing	Kubutambahan	Baik	Diresmikan, 24 Januari 2016	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Bontihing tanggal 17 Agustus 1946, yang gugur : Lettu Jedeng, Pan Liadi dan Wayan Turun
19	Monumen Ista Yudha Pahala	2 Are	Penuktukan	Tejakula	Baik	Diresmikan, 10 Januari 2001	Mengenang sejarah penangkapan Shodanco N. Melaya oleh tentara jepang tanggal 15 Desember 1945, Nica mengurung dan membakar beberapa rumah markas pemuda pimpinan Shodanco N. Melaya, tanggal 22 Mei 1946 gugur 1 orang : Nengah Nagi
20	Monumen Dharma Yudha Mandala	20 Are	Bondalem	Tejakula	Baik dan perlu ditata lagi	Diresmikan, 30 April 1992	Memperingati pertempuran 1 Mei 1946 antara pejuang se-Kecamatan Tejakula melawan NICA dan AP gugur 29 orang pejuang

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

DATA MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN DI KABUPATEN BULELENG

MONUMEN PERINGATAN PERJUANGAN

Diresmikan	: 20 Mei 1979
Lokasi	: Desa Kedis Kec. Busungbiu
Maksud	: Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	: Patung
Pengelola	: Pemerintah Desa Kedis
Kondisi monument	: Rusak ringan
Sumber data	: Sesepuh/Pelaku Perjuangan Kemerdekaan
Keterangan monument	: Mengenang sejarah perjuangan masyarakat

MONUMEN KUSUMA YUDA

Diresmikan	: 17 Agustus 2009
Lokasi	: Desa Tinggarsari Kec. Busungbiu
Maksud	: Untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan
Bentuk fisik	: Patung dan Pura Pejuang
Pengelola	: Warga masyarakat dusun kapas jawa Ds. Tinggarsari
Kondisi monument	: Masih layak
Sumber data	: Sesepuh/Pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	: Diperingati setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun dilaksanakan upacara bendera, pujawalnya dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun

MONUMEN DESA BANJARASEM

Diresmikan	: -
Lokasi	: Banjar Dinas Dajan Rurung, Desa Banjarasem Kec. Seririt
Maksud	: Mengenang perjuangan di Desa Banjarasem
Bentuk fisik	: Tugu
Pengelola	: Desa Banjarasem
Kondisi monument	: Cukup Baik
Sumber data	: LVRI Anak Ranting Desa Banjarasem
Keterangan monument	: -

MONUMEN DESA JOANYAR

Diresmikan	: -
Lokasi	: Desa Joanyar
Maksud	: Mengenang Perjuangan di Desa Joanyar Kec. Seririt
Bentuk fisik	: Patung
Pengelola	: Pemerintah Desa Joanyar
Kondisi monument	: Cukup Baik
Sumber data	: -
Keterangan monument	: -

MONUMEN TUGU PERJUANGAN

Diresmikan	: 20 Mei 2008
Lokasi	: Desa Pelapuan Kec. Busungbiu
Maksud	: Disini para pejuang bermarkas dan mengucapkan kaul
Bentuk fisik	: Patung dan Pura
Pengelola	: Warga masyarakat Dusun Pasut Nangka
Kondisi monument	: Belum sempurna
Sumber data	: Sesepeuh/Pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	: Mengenang sejarah perjuangan dan para pejuang Berkaul diantaranya: <ol style="list-style-type: none">1. Made Sangka (Pak Germong)2. Made Toya3. Sanusi4. Pak Sahri alias Pak Bedugul (Jawa)5. Pak Jiwa

MONUMEN TUGU LILA PANCHA GRAHA

Diresmikan	: Hari Sabtu, 30 Nopember 2002
Lokasi	: Desa Pakisan Kec. Kubutambahan
Maksud	: Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	: Kurang baik, 2 x 2 meter persegi
Pengelola	: Pemerintahan desa
Kondisi monument	: Rusak



Sumber data : LVRI Anak Ranting Desa Pakisan
Keterangan monument : Mengenang para pejuang yang gugur:
1. Pan Ropen
2. Pan Ginarsa
3. I Suwarandia
4. I Santa
5. I Kandel
6. I Metra/Meter
7. Pan Teka
8. I Tinggal

MONUMEN KUSUMA MANDALA

Diresmikan : Tanggal 01 Oktober 1996
Lokasi : Banjar Dinas Tunjung Mekar, Desa Bubunan Kec. Seririt
Maksud : Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik : Tugu
Pengelola : Pemerintah Desa Bubunan
Kondisi monument : Baik
Sumber data : LVRI Anak Ranting Desa Bubunan
Keterangan monument : Mengenang sejarah perjuangan Desa Bubunan
Tanggal 06 April yang gugur:
1. Nengah Sumandra
2. Wayan Sada
3. Ketut Suweca

MONUMEN KUSUMA MANDALA

Diresmikan : Tanggal 20 - 05 - 1989
Lokasi : Banjar Dinas Taman, Desa Bestala Kec. Seririt
Maksud : Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik : Patung
Pengelola : Pemerintah Desa Bestala
Kondisi monument : Baik
Sumber data : Sesepuh pejuang kemerdekaan

Keterangan monument : Mengenang sejarah perjuangan:

1. Made Anila (04-04-1946)
2. Ketut Mudana (25-06-1946)
3. Putu Sedana (05-05-1947)
4. Made Cana (1948)
5. Nyoman Sumada (31-07-1978)

MONUMEN KUSMUMA YUDHA

Diresmikan : 17 Agustus 1995
Lokasi : Desa Ringdikit
Maksud : Untuk mengenang perjuangan di Desa Ringdikit Kec. Seririt
Bentuk fisik : 5 x 5 M2
Pengelola : Pemerintah Desa Ringdikit
Kondisi monument : Baik
Kondisi prasarana : Rusak
Sumber data : LVRI Anak Ranting Desa Ringdikit
Keterangan monument : Mengenang para pejuang yang gugur:
1. J. Willem
2. Mr. X
3. I Dewa Made Rai
4. I Gusti Agung Putra (Maruti)
5. Mukadis
6. I Gede Rai
7. Sulandra
8. Dewa Putu Sumpena
9. Gede Tantri

MONUMEN PERINGATAN PERJUANGAN

Diresmikan : 17 Agustus 1979
Lokasi : Desa Busungbiu Kec. Busungbiu
Maksud : Mengenang pejuang yang gugur
Bentuk fisik : Patung
Pengelola : Pemerintah Desa Busungbiu



Kondisi monument : Rusak berat
Sumber data : Sesepuh / pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument : Mengenang sejarah perjuangan masyarakat
Desa Busungbiu, yang gugur:
1. Wirta
2. I Ketut Sajeng
3. I Nyoman Mandra
4. I Ketut Wita

MONUMEN WIRA BHUANA

Diresmikan : -
Lokasi : Jalan Raya Singaraja - Denpasar (Desa Gitgit)
Maksud : Mengenang perjuangan
Bentuk fisik : Tugu
Pengelola : Swadaya
Kondisi monument : Sedang
Sumber data : Markas cabang LVRI Kabupaten Buleleng
Keterangan monument : Pertempuran antara pemuda pejuang dengan serdadu NICA tanggal 12 Mei 1946, 9 orang pemuda pejuang gugur

MONUMEN TUGU PERINGATAN PERJUANGAN DESA SEPANG

Diresmikan : -
Lokasi : Desa Sepang Kec. Busungbiu
Maksud : Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik : Patung
Pengelola : Pemerintah Desa Sepang
Kondisi monument : Rusak Berat
Sumber data : Sesepuh/pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument : Mengenang sejarah perjuangan masyarakat desa sepang

MONUMEN PURA PERJUANGAN

Diresmikan	: 17 Agustus 2010
Lokasi	: Desa Pelapuan Kec. Busungbiu
Maksud	: Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Bonagung
Bentuk fisik	: Pura pucak
Pengelola	: Warga masyarakat Banjar Dinas Bonagung
Kondisi monument	: Baik
Sumber data	: Sesepuh / pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	: Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Pelapuan

MONUMEN DESA PANGKUNG PARUK

Diresmikan	: Tahun 1935
Lokasi	: Banjar Dinas Yeh Selem, Desa Pangkungparuk Kec. Seririt
Maksud	: Mengenang perjuangan di Desa Pangkungparuk
Bentuk fisik	: Pelinggih
Pengelola	: Pemerintah Desa Pangkungparuk
Kondisi monument	: Cukup Baik
Sumber data	: LVRI anak ranting Desa Pangkungparuk
Keterangan monument	: Tempat penyingkiran

MONUMEN PAN JANJI

Diresmikan	: 01 Januari 1993
Lokasi	: Br. Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung Kec. Kubutambahan
Maksud	: Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	: Segi empat, 3 x 3 Mtr
Pengelola	: Pemerintah Desa Tunjung / LVRI anak ranting Desa Tunjung
Kondisi monument	: Setengah Rusak
Sumber data	: Pelaku pejuang kemerdekaan
Keterangan monument	: Mengenang para pejuang yang gugur: 1. Pan Janji 2. Moyo



MONUMEN NYOMAN RUMADA

Diresmikan	: 17 Agustus 2014
Lokasi	: Desa Tamblang Kec. Kubutambahan
Maksud	: Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	: Patung
Pengelola	: Pemerintah Desa Tamblang
Kondisi monument	: Cukup baik
Sumber data	: Sesepuh/pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	: Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Tamblang yang gugur

MONUMEN STHANA WIRA YUDHA

Diresmikan	: 19 Maret 2003
Lokasi	: Desa Depeha Kec. Kubutambahan
Maksud	: Untuk mengenang perjuangan di Munduk Ngandang Desa Depeha
Bentuk fisik	: 3 x 3 Mtr (Persegi)
Pengelola	: Pemerintah Desa Depeha
Kondisi monument	: Sedikit Rusak
Sumber data	: LVRI anak ranting Desa Depeha
Keterangan monument	: Mengenang para pejuang yang gugur: 1. I Gede Ngurah 2. I Wayan Gina

MONUMEN GIRI SATRYA YUDHA BHAKTI

Diresmikan	: 24 Januari 2016
Lokasi	: Banjar Dinas Kawanan, Desa Bontihing Kec. Kubutambahan
Maksud	: Mengenang para pejuang
Bentuk fisik	: Tugu
Pengelola	: Pemerintah Desa
Kondisi monument	: Baik
Sumber data	: LVRI anak ranting Desa Bontihing dan Pemerintah Desa Bontihing



Keterangan monument : Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Bontihing tanggal 17 Agustus 1946, yang gugur:

1. Lettu Jedeng
2. Pan Liadi
3. Wayan Turun

MONUMEN ISTA YUDHA PAHALA

Diresmikan : 10 Januari 2001

Lokasi : Desa Penuktukan (Kecamatan Tejakula - Buleleng)

Maksud : Perjuangan tak pernah sirna

Bentuk fisik : Patung Obor dan pejuang

Pengelola : Desa / swadaya masyarakat

Kondisi monument : Baik

Sumber data : Wayan Suwanda / Pelaku Sejarah

Keterangan monument : Luas 2 are.

1. 15 Desember 1945 : Tentara Jepang menangkap Shodanco N. Melaya sebagai salah satu penggerak upaya perebutan senjata di Tangsi Jepang - Banyumala Singaraja 13 Desember 1945
2. 22 Mei 1946 : Nica mengurung dan membakar beberapa rumah markas pemuda pimpinan Shodanco N. Malaya gugur 1 orang: Nengah Nagi



MONUMEN DHARMA YUDHA MANDALA

Diresmikan	: 30 April 1992
Lokasi	: Desa Bondalem (Kecamatan Tejakula - Buleleng)
Maksud	: Melestarikan jasa para pejuang
Bentuk fisik	: Patung Pejuang
Pengelola	: Veteran Kecamatan Tejakula
Kondisi monument	: Baik dan perlu ditata lagi
Sumber data	: Hartawan Mataram
Keterangan monument	: Luas 20 are, didirikan swadaya masyarakat. Memperingati pertempuran 1 Mei 1946 antara pejuang se-Kecamatan Tejakula melawan NICA dan AP, gugur 29 orang pejuang



Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kesejahteraan sosial khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Secara umum upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup para Penyandang masalah kesejahteraan Sosial adalah dengan melaksanakan beberapa program pembinaan melalui Bimbingan Sosial Mental, pelatihan Keterampilan Usaha , serta pemberian bantuan perlindungan dan jaminan sosial sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan secara terintegrasi lintas sektor dengan berbagai SKPD.

Dengan tampilan data diatas ada beberapa item data yang tidak plus atau kurang dipahami, untuk itu kami minta saran dan dukungan untuk perbaikan kedepannya.

Semoga Buku Profil ini dapat bermanfaat bagi kita semua, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan buku profil ini.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

